



Katalog BPS -1306030

ANALISIS KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN



BADAN PUSAT STATISTIK

**ANALISIS KEMISKINAN,
KETENAGAKERJAAN, DAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN**



BADAN PUSAT STATISTIK

**ANALISIS KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN**

ISBN : 978-979-064-129-7

No. Publikasi : 07310.0903

Katalog BPS : 1306030

Ukuran Buku : 16,5 cm x 22,5 cm

Jumlah Halaman: 168 Halaman

Naskah : Sub Direktorat Analisis Statistik

Gambar Kulit : Sub Direktorat Analisis Statistik

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh :

KATA PENGANTAR

Kebijakan pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat membawa berbagai dampak negatif seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Dampak negatif ini terjadi karena efek menetes ke kalangan bawah (*trickle down effect*) dalam menikmati hasil-hasil pembangunan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang baik, namun di sisi lain realitas kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan masih menyelimuti sebagian besar rakyat Indonesia dan menjadi tantangan besar dalam pembangunan. Publikasi Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan ini berisi analisis yang mengkaji keterkaitan ketiga masalah tersebut. Analisis yang dilakukan meliputi hubungan kemiskinan dengan ketenagakerjaan, hubungan kemiskinan dengan distribusi pendapatan, dan hubungan kemiskinan dengan ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan. Diharapkan analisis ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan analisis di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2009
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan Penulisan	7
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. KAJIAN LITERATUR	9
2.1. Kemiskinan	11
2.1.1. Jenis-jenis Kemiskinan	11
2.1.2. Pendekatan dalam Pengukuran Kemiskinan	16
2.2. Distribusi Pendapatan	22
2.3. Ketenagakerjaan	25
2.4. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan	26

	Halaman
BAB III. METODOLOGI PENGHITUNGAN	31
3.1. Metode Penghitungan Kemiskinan	33
3.2. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan	40
3.3. Ketenagakerjaan	46
3.4. Model Hubungan Kausalitas Granger	52
3.5. Analisis Regresi Data Panel	54
BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS	57
4.1. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia	59
4.2. Hubungan antara Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	66
4.3. Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan	86
4.3.1. Pendahuluan	86
4.3.2. Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Indonesia	89
4.3.3. Hubungan Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Indonesia	95
4.3.4. Distribusi Pendapatan Menurut Beberapa Karakteristik	97
4.4. Hubungan antara Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan	111
BAB V. PENUTUP	119
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hala- Man
2.1.	Nilai Pengeluaran Perkapita Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Menurut Komponen dan Daerah di Indonesia, Maret 2008 (Rp/Kapita/Bulan)	20
4.1.	Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Gini Ratio 2004-2009	62
4.2.	Distribusi Angkatan Kerja Menurut Status Miskin dan Pekerjaan Tahun 2005-2007 (dalam %)	75
4.3.	Persentase Pengangguran Yang Miskin Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) Tahun 2005-2007	77
4.4.	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Kemiskinan Tahun 2005-2007	77
4.5.	Persentase Penduduk Bekerja yang Statusnya Miskin Menurut Sektor dan Jam Kerja Tahun 2005-2007	82
4.6.	Persentase Penduduk Bekerja yang Statusnya Miskin Menurut Status Pekerjaan dan Jam Kerja Tahun 2005-2007	85
4.7.	Hasil Uji Kausalitas Granger Dengan Lag 1 – 3	96
4.8.	Gini Rasio Menurut Daerah dan Status Miskin Tahun 2005-2007	98

No. Tabel	Judul Tabel	Hala- Man
4.9.	Rasio Q_5/Q_1 Menurut Status Daerah dan Status Miskin Tahun 2005-2007	100
4.10.	Gini Rasio Menurut Status Pekerjaan dan Status Miskin Tahun 2005-2007	103
4.11.	Rasio Q_5/Q_1 Menurut Status Pekerjaan dan Status Miskin Tahun 2005-2007	105
4.12.	Gini Rasio Menurut Sektor dan Status Miskin Tahun 2005-2007	108
4.13.	Rasio Q_5/Q_1 Menurut Sektor dan Status Miskin Tahun 2005-2007	110
4.14.	Hasil dari Model Persamaan Regresi Data Penel	114

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Hala- Man
3.1.	Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz	41
4.1.	Hasil Uji Kausalitas Granger antara Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Periode 1999-2009	65
4.2.	Persentase Penduduk Miskin (Po) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, 2001-2009	67
4.3.	Hubungan antara perubahan persentase penduduk Miskin (Po) dan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2001-2009	68
4.4.	Hubungan antara persentase penduduk Miskin (Po) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut provinsi, 2007	70
4.5.	Hubungan antara perubahan persentase penduduk Miskin (Po) dan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut provinsi, 2004-2007	70
4.6.	Persentase Kemiskinan Menurut Status Pekerjaan, 2005-2007	79
4.7.	Distribusi Angkatan Kerja Yang Bekerja dan Statusnya Miskin Menurut Sektor Tahun 2005-2007	80

No. Gambar	Judul Gambar	Hala- Man
4.8.	Distribusi Angkatan Kerja Yang Bekerja dan Statusnya Miskin Menurut Status Pekerjaan Tahun 2005-2007	83
4.9.	Persentase Penduduk Miskin dan Gini Ratio di Indonesia, 2004-2009	90
4.10.	Hubungan antara perubahan persentase penduduk Miskin (Po) dan perubahan Gini Ratio , 2004-2009	91
4.11.	Persentase Penduduk Miskin dan Gini Ratio di Indonesia Perkotaan, 1999-2008	92
4.12.	Persentase Penduduk Miskin dan Gini Ratio di Indonesia Perdesaan, 1999-2008	92
4.13.	Persentase Penduduk Miskin dan Gini Ratio menurut provinsi, 2007	93
4.14.	Hubungan antara perubahan persentase penduduk Miskin (Po) dan perubahan Gini Ratio Menurut provinsi, 2004-2007	94
4.15.	Gini Rasio Menurut Daerah Tahun 2005-2007	99
4.16.	Rasio Q5/Q1 Menurut Daerah Tahun 2005-2007	101
4.17.	Gini Rasio Menurut Status Pekerjaan Tahun 2005-2007	104
4.18.	Rasio Q5/Q1 Menurut Status Pekerjaan Tahun 2005-2007	106

No. Gambar	Judul Gambar	Hala- Man
4.19.	Gini Rasio Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2007	109
4.20.	Rasio Q5/Q1 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2007	111

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Hala- Man
1.	Output dari Persamaan Regresi Menggunakan Variabel Dependen PDRB, Gini Rasio, Pengangguran, Indeks Harga Konsumen Makanan, Rasio Pengeluaran Non Makanan (Metode Common Effects)	135
2.	Output dari Persamaan Regresi Menggunakan Variabel Dependen PDRB, Gini Rasio, Pengangguran, Indeks Harga Konsumen Makanan, Rasio Pengeluaran Non Makanan (Metode Fixed Effects)	136
3.	Output dari Persamaan Regresi Menggunakan Variabel Dependen PDRB, Gini Rasio, Pengangguran, Indeks Harga Konsumen Makanan, Rasio Pengeluaran Non Makanan (Metode Random Effects)	138
4.	Output dari Persamaan Regresi Menggunakan Variabel Dependen PDRB, Gini Rasio, Indeks Harga Konsumen Makanan, Rasio Pengeluaran Non Makanan (Metode Common Effects)	140

No. Lampiran	Judul Lampiran	Hala- Man
5.	Output dari Persamaan Regresi Menggunakan Variabel Dependen PDRB, Gini Rasio, Indeks Harga Konsumen Makanan, Rasio Pengeluaran Non Makanan (Metode Fixed Effects)	141
6.	Output dari Persamaan Regresi Menggunakan Variabel Dependen PDRB, Gini Rasio, Indeks Harga Konsumen Makanan, Rasio Pengeluaran Non Makanan (Metode Random Effects)	143
7.	Output dari Persamaan Regresi Menggunakan Variabel Dependen PDRB, Pengangguran, Indeks Harga Konsumen Makanan, Rasio Pengeluaran Non Makanan (Metode Common Effects)	145
8.	Output dari Persamaan Regresi Menggunakan Variabel Dependen PDRB, Pengangguran, Indeks Harga Konsumen Makanan, Rasio Pengeluaran Non Makanan (Metode Fixed Effects)	146

No. Lampiran	Judul Lampiran	Hala- Man
9.	Output dari Persamaan Regresi Menggunakan Variabel Dependen PDRB, Pengangguran, Indeks Harga Konsumen Makanan, Rasio Pengeluaran Non Makanan (Metode Random Effects)	148
10.	Hasil Uji Kausalitas Granger antara Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Pengangguran, Periode 1999-2009	150

BAB 1

PENDAHULUAN

<http://www.ps-99.id>

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama Pemerintah Indonesia. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan Pemerintah, namun pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Persentase kemiskinan memang turun dari waktu ke waktu namun jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2009 masih cukup besar yaitu 32,53 juta jiwa atau sekitar 14,15 persen dari total penduduk. Sebagian besar (63,39 persen) penduduk miskin ini tinggal di daerah perdesaan sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dimulai dari desa. Pembangunan sektor pertanian khususnya dan daerah perdesaan pada umumnya, termasuk di dalamnya infrastruktur perdesaan seperti jalan, irigasi, listrik, sarana air bersih, dan lain sebagainya, perlu mendapatkan prioritas utama di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena banyak faktor yang mempengaruhi terciptanya kemiskinan. Sebagai masalah yang bersifat multidimensi, kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan tidaklah mudah. Banyak faktor yang ditengarai berpengaruh besar terhadap kondisi kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah (81,40 persen kepala rumah tangga

miskin berpendidikan SD kebawah pada tahun 2009) membuat penduduk miskin mempunyai keterbatasan untuk mengembangkan diri. Akibatnya mereka tak mampu berkompetisi untuk memasuki lapangan kerja yang semakin terbatas dan membutuhkan kualifikasi yang tinggi. Mereka terpaksa menganggur atau bekerja dengan upah yang rendah sehingga pendapatannya tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendapatan yang sangat terbatas ini pada akhirnya membawa dampak negatif seperti buruknya derajat kesehatan dan gizi yang kemudian berpengaruh pada rendahnya daya tahan fisik dan daya pikir sehingga dapat mengurangi prakarsa dan inisiatif. Sulit bagi mereka untuk dapat mengubah nasibnya dari kondisi miskin menuju kondisi yang lebih baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain.

Persistensi tingkat kemiskinan yang masih tinggi memberikan indikasi bahwa ada sesuatu yang perlu dicermati dan dikaji ulang atas strategi, kebijakan, dan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah. Dilihat dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah memiliki perhatian yang serius untuk memerangi kemiskinan. Alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan meningkat tajam dari Rp 18 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 54 triliun di tahun 2007, dan dinaikkan lagi menjadi Rp 62 triliun pada tahun 2008. Langkah-langkah konsolidasi program penanggulangan kemiskinan ini diluncurkan Pemerintah dalam tiga cluster yaitu Paket Bantuan Program I yang merupakan bantuan dan perlindungan sosial (bantuan langsung tunai, beras miskin/raskin, jaminan kesehatan

masyarakat/jamkesmas, Program Keluarga Harapan/PKH, Bantuan Operasional Sekolah/BOS, bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dan lain sebagainya), Paket Bantuan Program II yang merupakan program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri), dan Paket Bantuan Program III yang merupakan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK-KUR). Jumlah dan persentase penduduk miskin turun selama tahun 2007-2009, namun banyak pihak menilai penurunan tersebut belum signifikan terutama kalau dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dibelanjakan.

Selain kemiskinan, masalah krusial lain yang dihadapi Indonesia adalah pengangguran. Kendati dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 masih cukup tinggi yaitu 8,14 persen atau setara dengan 9,26 juta jiwa. Disamping pengangguran terbuka, masalah setengah penganggur yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu juga menjadi persoalan pelik karena jumlahnya mencapai 31,36 juta orang.

Pengangguran terjadi karena berbagai faktor. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia umumnya lebih kecil dari jumlah angkatan kerja yang ada, padahal jumlah penganggur yang ada selama ini sudah cukup besar. Kondisi ini berjalan bertahun-tahun sehingga terjadi akumulasi pengangguran yang semakin tahun menjadi semakin besar. Situasi ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan juga karena kelangkaan modal untuk

berinvestasi sehingga tidak mampu menyerap pertambahan tenaga kerja. Faktor lain adalah kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga mengakibatkan tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja juga berkontribusi terhadap terjadinya pengangguran.

Besarnya jumlah penganggur dan setengah penganggur harus dicermati karena dapat menimbulkan berbagai dampak sosial yang dapat mengganggu pembangunan. Selain menimbulkan konsekuensi kemiskinan, pengangguran juga berkontribusi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pengangguran juga dapat menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan menurun. Situasi ini akan membuat para investor enggan untuk menanamkan modalnya dalam rangka melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Penurunan tingkat investasi ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah negara tidak terlepas dari strategi pembangunan yang diterapkan. Pada tahun 1960-an, pembangunan ekonomi dengan strategi pertumbuhan banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Perencanaan ekonomi Indonesia di awal masa Orde Baru sangat percaya pada adanya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga strategi pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai jalan

keluar untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan politik. Akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa efek menetes ke bawah yang diharapkan ternyata tidak berjalan sempurna. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum diikuti oleh perluasan kesempatan kerja yang sebanding sehingga jumlah pengangguran masih besar, tingkat kemiskinan tidak berkurang secara signifikan dan ada indikasi melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pembangunan yang diambil kurang tepat sasaran sehingga hasilnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan upaya pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan analisis ini adalah :

- a. Melihat hubungan antara kemiskinan dan ketenagakerjaan.
- b. Melihat hubungan antara kemiskinan dan distribusi pendapatan.
- c. Melihat hubungan antara kemiskinan, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan.

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Keterkaitan antara kemiskinan, ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan hanya dianalisis di level nasional. Sumber data utama

yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor keadaan Februari 2005, Maret 2006 dan Maret 2007. Jumlah sampel sekitar sepuluh ribu rumah tangga per tahun. Data Susenas panel modul konsumsi digunakan untuk menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin serta distribusi pendapatan, sementara variabel yang berkaitan dengan ketenagakerjaan diambil dari data Susenas Kor. Selain sumber data utama tersebut, juga digunakan data-data lain seperti data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan PDB.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari 5 bab. Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan sumber data serta sistematika penulisan. Bab II merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan konsep kemiskinan dan pendekatan pengukuran kemiskinan, ketenagakerjaan, distribusi pendapatan, dan hasil beberapa penelitian yang mengkaitkan antara ke tiga aspek tersebut. Bab III menjelaskan tentang metode penghitungan garis kemiskinan, ukuran kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan, ukuran distribusi dan ketimpangan pendapatan, serta model kuantitatif dari hubungan antara kemiskinan, ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan. Bab IV membahas tentang keterkaitan antara kemiskinan, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan baik melalui analisis deskriptif (tabel dan grafik), maupun analisis model. Bab V merupakan bab penutup yang berisi ringkasan.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

<http://www.pps.id>

2.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

2.1.1. Jenis-jenis Kemiskinan

a. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita".

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan

relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998 : 26). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Tatkala negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan pengecualian Amerika Serikat, dimana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

b. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar

minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilainya dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan/ pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup sehingga garis kemiskinan absolut dapat membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang ingin menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut.

Bank Dunia menghitung garis kemiskinan absolut dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$ PPP (*Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli*), bukan nilai tukar US\$ resmi. Tujuannya adalah untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$1 di Amerika. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada umumnya ada dua

ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu: a) US\$ 1 PPP perkapita per hari; b) US\$ 2 PPP perkapita per hari. Ukuran tersebut sekarang direvisi menjadi US\$ 1,25 PPP dan US\$ 2 PPP per kapita per hari.

Pendapatan per kapita yang tinggi sama sekali bukan merupakan jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah yang besar. Hal ini mengingat besar atau kecilnya porsi atau bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok-kelompok penduduk yang paling miskin tidak sama untuk masing-masing negara, sehingga mungkin saja suatu negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru mempunyai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan internasional yang lebih besar dibandingkan dengan suatu negara yang pendapatan per kapitanya lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain struktur pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di negara yang bersangkutan, berbagai pengaturan politik dan kelembagaan yang dalam prakteknya ikut menentukan pola-pola distribusi pendapatan nasional.

c. Terminologi Kemiskinan Lainnya

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan" yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan". Dikatakan tak

menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu!) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, suku Tengger di pegunungan Tengger Jawa Timur, dan sebagainya.

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

2.1.2. Pendekatan dalam Pengukuran Kemiskinan

Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh *International Labor Organisation* (ILO) pada tahun 1976 dengan judul

“Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Di samping itu kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut *United Nations* (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas:
 - (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi,

- perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
 4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
 5. Menurut Hendra Esmara (1986: 320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
 6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Berdasarkan komposisi pengeluaran konsumsi penduduk, dapat dihitung besarnya kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen seperti disajikan pada Tabel 2.1. Indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein.
- b. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- c. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air.
- d. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).
- e. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

Tabel 2.1.
Nilai Pengeluaran Perkapita Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Menurut Komponen dan Daerah di Indonesia, Maret 2008 (Rp/Kapita/Bulan)

Jenis Pengeluaran	Kota	Desa	Jenis Pengeluaran	Kota	Desa
Makanan					
1. Beras	32.499,3	40.913,5	27. Nangka muda	81,0	123,1
2. Beras ketan	52,1	123,0	28. Bawang merah	1.798,9	1.970,1
3. Jagung pipilan	178,9	1.122,8	29. Cabe merah	1.847,1	1.680,9
4. Tepung terigu	468,2	436,9	30. Cabe rawit	1.212,7	1.622,3
5. Ketela pohon	545,1	982,3	31. Kacang tanah tanpa kulit	156,7	186,9
6. Ketela rambat	170,9	329,7	32. Tahu	2.629,7	1.735,8
7. Gaplek	11,4	59,7	33. Tempe	2.961,6	2.246,2
8. onkol/Tuna/Cakalang	1.235,0	1.271,0	34. Mangga	52,5	57,2
9. Kembung	1.130,2	722,8	35. Salak	292,6	226,7
10. Teri	174,3	215,7	36. Pisang ambon	259,4	283,8
11. Bandeng	711,7	548,2	37. Pepaya	214,8	170,9
12. Mujair	683,5	608,1	38. Minyak kelapa	1.158,5	1.864,2
13. Daging sapi	236,3	94,1	39. Kelapa	928,6	1.378,0
14. Daging babi	91,1	324,3	40. Gula pasir	3.585,2	4.383,8
15. Daging ayam ras	2.715,0	1.086,8	41. Gula merah	352,0	518,4
16. Daging ayam kampung	315,8	596,0	42. Teh	802,8	750,1
17. Tetelan	69,0	16,2	43. Kopi	1.660,2	2.013,9
18. Telur ayam ras	3.908,4	2.551,3	44. Garam	318,4	464,6
19. Telur itik/manila	94,2	185,3	45. Kemiri	294,1	279,1
20. Susu kental manis	1.198,5	681,9	46. Terasi/petis	392,3	448,5
21. Susu bubuk	837,7	251,1	47. Mie instan	498,4	433,2
22. Bayam	739,2	660,3	48. Kerupuk	3.922,9	2.956,4
23. Buncis	158,5	164,0	49. Roti manis	1.319,7	957,8
24. Kacang panjang	710,3	921,4	50. Kue kering	792,1	614,0
25. Tomat sayur	645,8	546,1	51. Kue basah	1.427,6	1.208,2
26. Daun ketela pohon	386,3	997,5	52. Rokok kretek filter	9.736,0	5.965,8

Lanjutan Tabel 2.1

Jenis Pengeluaran	Kota	Desa	Jenis Pengeluaran	Kota	Desa
Bukan Makanan					
1. Perumahan	15.116	8.547	19. Pakaian jadi laki-laki dewasa	2.045	1.427
2. Listrik	6.294	2.747	20. Pakaian jadi perempuan dewasa	1.944	1.414
3. Air	1.016	176	21. Pakaian jadi anak-anak	1.875	1.450
4. Minyak tanah	5.429	1.369	22. Keperluan menjahit	100	68
5. Kayu Bakar	1.924	2.749	23. Alas kaki	1.012	885
6. Obat nyamuk, korek api, baterai	1.069	793	24. Tutup kepala	209	184
7. Pos dan benda pos	2	4	25. Handuk/ikat pinggang	107	90
8. Perlengkapan mandi	2.460	1.808	26. Perlengkapan perabot rumah tangga	61	94
9. Barang kecantikan	1.033	701	27. Perkakas rumah tangga	125	164
10. Perawatan kulit/muka	642	392	28. Alat dapur/makan	178	299
11. Sabun cuci	1.203	1.555	29. Arloji/jam	28	11
12. Pendidikan	3.781	1.385	30. Tas	62	45
13. Kesehatan	1.889	1.365	31. Mainan anak	170	79
14. Bahan pemeliharaan pakaian	294	95	32. Pajak Bumi Bangunan (PBB)	243	168
15. Pemeliharaan kesehatan	158	51	33. Pajak kendaraan bermotor	684	322
16. Bensin	2.763	1.256	34. Pungutan lain	395	140
17. Angkutan	5.571	2.055	35. Perayaan hari raya agama	147	110
18. Foto	119	55	36. Upacara agama	848	573

Sumber: Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008

2.2. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menentukan bagaimana pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum, tetapi hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu. Antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan distribusi pendapatan terdapat suatu *trade off* yang membawa implikasi bahwa pemerataan dalam pembagian pendapatan hanya dapat dicapai jika laju pertumbuhan ekonomi diturunkan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu akan disertai dengan memburuknya distribusi pendapatan atau terjadi kenaikan ketimpangan relatif.

Menurut para ahli, pembangunan ekonomi bukan hanya menyebabkan kenaikan dalam ketimpangan relatif, tetapi juga akan menyebabkan kemerosotan taraf hidup absolut dari golongan miskin. Atau dengan kata lain, ketimpangan relatif dan kemiskinan absolut akan bertambah akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hasil penelitian mengenai hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh Prof. Simon Kuznets dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal pada umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan,

yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut.

Procovitch menyebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya kepincangan pembagian pendapatan dikarenakan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, perkembangan kota desa, dan sistem pemerintahan yang bersifat plutokratis. Beberapa aspek yang telah diduga oleh Procovitch tersebut dikembangkan oleh Kuznets yang dikenal dengan hipotesa Kuznets yang menimbulkan kontroversi di kalangan peneliti distribusi pendapatan di berbagai negara. Hipotesa ini menyatakan bahwa hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepincangan pembagian pendapatan pada tahap awal pembangunan menjadi negatif. Jadi, pada tahap pertama pembangunan ekonomi akan mengalami tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang semakin memburuk, stabil dan akhirnya menurun. Pola perkembangan ini menurut Kuznets tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Penyebabnya adalah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kurang efektifnya pajak yang progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal.

Sementara itu, Chiswick menyatakan bahwa dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, kesenjangan pembagian penghasilan masyarakat juga meningkat, karena semakin cepat ekonomi berkembang, maka orang mengharapkan hasil yang semakin tinggi dari pendidikannya, sementara kesempatan pendidikan sangat terbatas. Tingkat partisipasi penduduk dalam lapangan pekerjaan berkaitan dengan jumlah penduduk muda yang

sedang sekolah atau sedang bekerja. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula, dan hal ini akan membuat pembagian pendapatan semakin senjang. Sebaliknya, jika penduduk muda ini masih tetap menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, berakibat berkurangnya kelompok penduduk yang berpendapatan rendah sehingga akibat selanjutnya adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan pun akan menurun.

Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :

1. Distribusi Pendapatan Antar Golongan Pendapatan (*Size Distribution of Income*) atau ketimpangan relatif.
2. Distribusi Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan (*Urban-Rural Income Disparities*). Menurut Gupta dari World Bank, pola pembangunan Indonesia memperlihatkan suatu urban bias, yaitu pembangunan yang berorientasi ke daerah perkotaan, dengan tekanan yang berat pada sektor industri yang terorganisir, yang merupakan sebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih parah lagi di kemudian hari. Menurut Michael Lipton, seorang ekonom Inggris, menyebutkan bahwa urban bias seringkali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia di mana alokasi sumber-sumber daya lebih banyak diprioritaskan di daerah perkotaan daripada pertimbangan pemerataan atau efisiensi.

3. Distribusi Pendapatan Antar Daerah (*Regional Income Disparities*).

Ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia serta penyebaran sumber daya alam yang tidak merata menjadi penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia khususnya.

2.3. Ketenagakerjaan

Salah satu persoalan mendasar dalam aspek ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Selain pengangguran terbuka, juga dikenal istilah Setengah Pengangguran (*Under Unemployment*) yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Permasalahan pengangguran dan setengah penganggur ini merupakan persoalan serius karena dapat menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Dilihat dari penyebabnya, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis:

- a. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Penduduk tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk memasuki sektor baru sehingga mereka menganggur. Contoh: Para petani kehilangan pekerjaan karena daerahnya berubah dari daerah agraris menjadi daerah industri.
- b. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian (misal terjadi resesi) sehingga menyebabkan berkurangnya permintaan masyarakat (*aggrerat demand*).
- c. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.
- d. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja.
- e. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern yang menggantikan tenaga kerja manusia.

2.4. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan

Dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan output agregat (Produk Domestik Bruto) maupun pertumbuhan output sektoral terhadap pengurangan

jumlah orang miskin. Ravallion dan Datt (1996) dalam studinya yang menggunakan kasus India menemukan bahwa pertumbuhan output di sektor-sektor primer (pertanian) jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sektor-sektor sekunder. Sementara Kakwani (2001) di Filipina menyimpulkan bahwa peningkatan 1 persen output di sektor pertanian dapat mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sedikit di atas 1 persen. Sebaliknya persentase pertumbuhan yang sama di sektor industri dan jasa hanya mengakibatkan pengurangan kemiskinan sekitar 0,25 – 0.30 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan karena berbagai alasan. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi seperti ini umumnya lebih memberikan keberpihakan kepada pengembangan sektor sektor tertentu sehingga mempersempit peluang berkembangnya sektor lain, yang pada akhirnya akan berakibat pada berkurangnya jenis lapangan kerja yang tersedia. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan kemiskinan. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi untuk memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran jika struktur tenaga kerja yang ada didominasi oleh tenaga kerja berkemampuan rendah (*low*

skill labor). Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditunjang oleh kekuatan ekonomi yang bersifat terkonsentrasi juga tidak akan sanggup mengatasi masalah kemiskinan (Rajasa, 2007).

Dalam kaitan antara kemiskinan dan pengangguran, banyak literatur yang menyatakan ada hubungan yang erat antara pengangguran dan kemiskinan, tetapi untuk membuktikannya secara empiris tidaklah mudah. Ada banyak alasan mengapa tingkat pengangguran dan kemiskinan di sebuah negara kadang kala tidak berjalan searah bahkan seringkali bergerak kearah yang berlawanan. Selain karena alasan-alasan dari sisi ekonomi, masalah konsep dan metodologi yang digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran dan kemiskinan juga membuat upaya untuk meneliti hubungan kedua variabel tersebut menjadi rumit (Saunders, 2002).

Munandar, Kurniawan dan Santoso (2007) yang melakukan penelitian berdasarkan estimasi perilaku siklikal (*cyclical behaviour*) kemiskinan dan pengangguran, menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan akan turun jika pengangguran turun. Dalam jangka pendek (satu tahun) terdapat hubungan positif yang signifikan antara perubahan tingkat pengangguran dengan perubahan tingkat kemiskinan, yaitu adanya *one-to-one* mapping antara penurunan pengangguran dengan membaiknya tingkat kemiskinan.

Menurut Bappenas (2004), kemiskinan dan ketimpangan merupakan konsep yang berbeda, tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang erat antara keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan,

pemenuhan kebutuhan dasar, dan kapabilitas), sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di antara anggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Karena itu, indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali digabungkan dalam analisis dan penilaian kemiskinan.

Zulfachri menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita mendorong perlambatan laju pertumbuhan kemiskinan, sebaliknya ketidakmerataan pendapatan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk miskin. Pengaruh ketimpangan pendapatan dalam mempercepat laju pertumbuhan kemiskinan ini dapat dilihat dari pangsa pendapatan perkotaan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Sektor primer, yang merupakan sektor yang paling besar distribusi pendapatannya, berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional. Sektor sekunder dan sektor tersier memberikan pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Sementara itu, Supandi dan Nurmanaf (2005) mengemukakan bahwa banyaknya penduduk miskin merupakan cerminan ketimpangan distribusi pendapatan dan aset yang makin buruk di antara rakyat banyak selama masa pembangunan. Hal ini secara langsung mempengaruhi ketidakmerataan kesempatan kerja yang produktif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Semoa dan Tesfa (2004) mengenai hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Virginia Barat dengan menggunakan data *cross section* dari 38 daerah pedesaan pada tahun 1980 dan 1990

menyimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara perubahan insiden kemiskinan dan perubahan ketimpangan pendapatan (direpresentasikan oleh gini rasio). Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang searah, dimana jika perubahan tingkat kemiskinan meningkat maka tingkat perubahan ketimpanganpun akan meningkat pula, demikian juga sebaliknya.

<http://www.bps.go.id>

BAB 3

METODOLOGI PENGHITUNGAN

<http://www.kips.id>

3.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

Dengan memperhatikan konsep dan definisi kemiskinan yang sangat luas, upaya untuk mengukur kemiskinan menjadi tidak mudah. Secara garis besar pengukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif atau moneter biasanya menggunakan data pendapatan atau pengeluaran rata-rata per kapita, tergantung ketersediaan datanya. Pendekatan kualitatif atau non-moneter dapat menggunakan indikator individu (angka kematian bayi, partisipasi sekolah, harapan hidup, dan sebagainya) atau indikator rumah tangga (kondisi rumah, proporsi pengeluaran makanan rumah tangga). Pengukuran kemiskinan yang paling banyak digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada data pendapatan/pengeluaran per kapita yang datanya diperoleh dari survei rumah tangga. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan kemiskinan seperti berapa jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu wilayah, bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, bagaimana tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya.

BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret. Sebagai informasi tambahan, digunakan pula hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non-makanan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, *penduduk miskin* adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk setiap provinsi, daerah perkotaan dan perdesaan.

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara adalah Garis Kemiskinan periode lalu yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan

(GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

dimana :

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

P = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

dimana:

K_{jkp} = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

\overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

dimana :

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/ hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

J = Daerah (perkotaan/perdesaan)

P = Provinsi p

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan. Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan

minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/ sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/ sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/ sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

dimana :

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/ sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

K = Jenis komoditi non-makanan terpilih.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

P = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\% PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

dimana :

$\%PM_p$ = % Penduduk miskin di provinsi p.

PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.

P_p = Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

dimana :

PM_I = Penduduk miskin Indonesia.

PM_p = Penduduk miskin provinsi p.

N = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_I = \frac{PM_I}{P_I}$$

dimana :

$\%PM_I$ = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

PM_I = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

P_I = Jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang dapat digunakan:

- Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

dimana:

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2).

3.2. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga yang bersumber dari Susenas sebagai proksi pendapatan. Beberapa ukuran yang biasa digunakan untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (*Gini Ratio*), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil, Indeks-L dan rasio Q5/Q1. Dalam analisis ini hanya digunakan dua ukuran yaitu koefisien Gini dan rasio Q5/Q1.

a. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i * (Fc_i + Fc_{i-1})$$

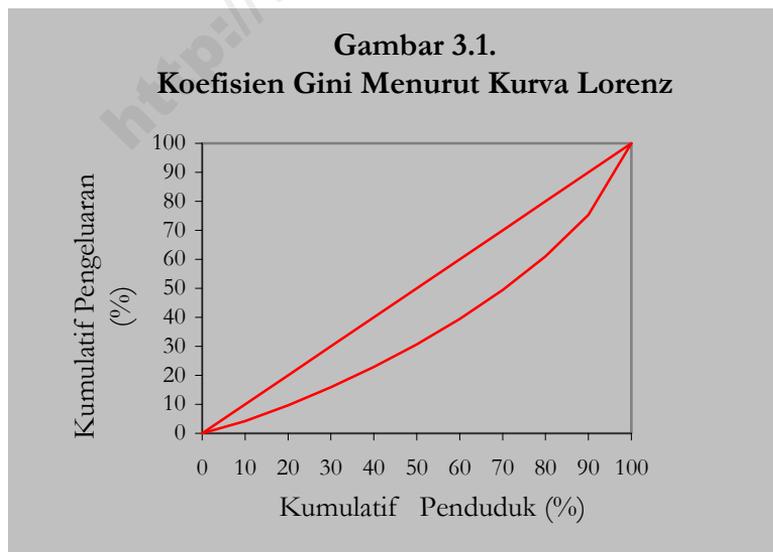
dimana:

GR = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

fp_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi
Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (sub-group).
- Dapat diuji secara statistik
Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks

antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan *ketimpangan pendapatan tinggi*;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan *ketimpangan pendapatan sedang/ menengah*;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan *ketimpangan pendapatan rendah*.

c. Indeks Theil dan Indeks-L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan “*generalized entrophy*”. Rumus “*generalized entrophy*” secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

dimana \bar{y} adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya).

Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- GE (1) disebut sebagai indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

- GE (0), juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y):

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln\left(\frac{\bar{y}}{y_i}\right)$$

3.3. Ketenagakerjaan

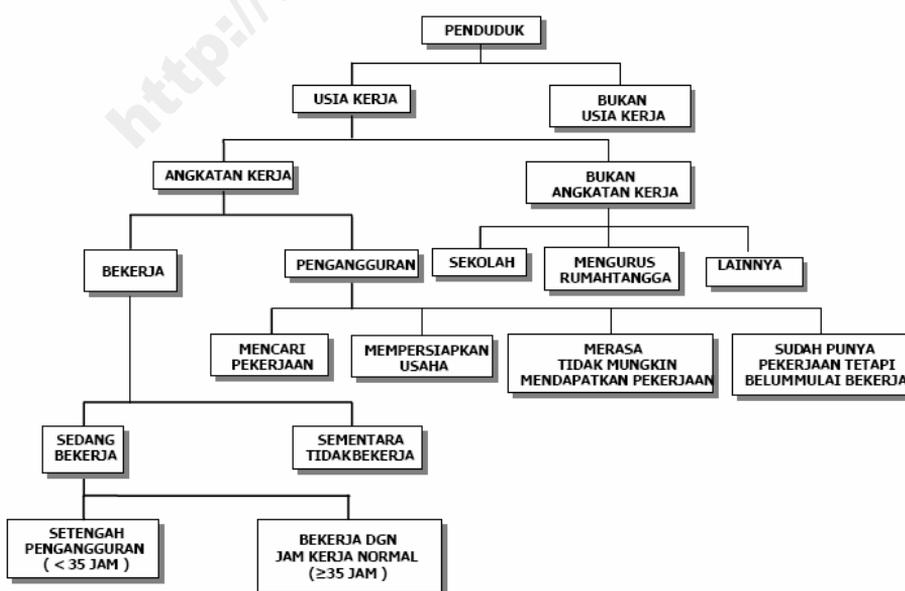
Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap 'para pencari kerja' yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi saja melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial (BPS, 2007).

Untuk memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan pengumpulan data ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan sensus dan survei antara lain Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas),

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan dengan pendekatan rumah tangga.

Dalam mengumpulkan dan menyajikan data ketenagakerjaan, BPS selalu menggunakan konsep/definisi yang direkomendasikan oleh *International Labor Organization* (ILO). Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia. Menurut Konsep *Labor Force Framework*, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan dalam Diagram Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Diagram Ketenagakerjaan



Beberapa konsep/definisi yang digunakan dalam ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

a. Penduduk

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

b. Usia kerja

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja.

c. Angkatan Kerja

Konsep Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

d. Bukan angkatan kerja

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

e. Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup,

baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya.

Kriteria satu jam (*the one-hour criterion*) digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya.

Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan pengangguran yang digunakan, di mana pengangguran adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) sehingga jika batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi pengangguran yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan *joint analysis* antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi. Kriteria satu jam ini bisa berarti satu jam per minggu maupun satu jam per hari.

Berdasarkan aktivitas/kegiatan ekonomi yang merujuk pada *the United Nations System of National Accounts* (SNA), penduduk usia kerja dikategorikan sebagai bekerja/mempunyai pekerjaan jika yang bersangkutan bekerja (meskipun hanya bekerja satu jam dalam periode referensi) atau mempunyai

pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Sejalan dengan *the labour force framework*, definisi internasional untuk bekerja didasarkan pada periode referensi yang pendek (satu minggu atau satu hari) "*a snapshot picture of the employment situation at a given time*". Bekerja dibedakan menjadi :

- Bekerja dengan jam kerja normal (≥ 35 jam).
- Setengah Penganggur

Penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (dalam hal ini 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja) dikategorikan sebagai setengah penganggur. Setengah pengangguran dibedakan menjadi dua yaitu:

✓ Setengah Penganggur Terpaksa

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

✓ Setengah Penganggur Sukarela

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

f. Pengangguran

Definisi baku untuk pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan

Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/ perluasan menjadi sebagai berikut :

Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Pengangguran dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri dari :

- a. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan,
- b. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha,
- c. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung sebagai berikut:

$$TPT = (UE/AK) * 100$$

dimana:

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

UE = Penduduk 15+ mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

AK = Angkatan Kerja.

3.4. Model Hubungan Kausalitas Granger

Variabel ekonomi seringkali tidak hanya mempunyai hubungan satu arah namun juga dapat menunjukkan hubungan dua arah yang bersifat kausalitas atau saling mempengaruhi. Contohnya adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan naik/ turunnya pengangguran, sebaliknya pengangguranpun dapat mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena kausalitas ini merupakan hubungan dua arah, maka dalam model kausalitas ini seluruh variabel merupakan variabel *dependent*. Salah satu metode atau model yang dapat digunakan untuk mendeteksi model kausalitas adalah model persamaan kausalitas Granger.

Untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel X dan variabel Y, maka model kausalitas Granger dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_t = \sum_{i=1}^n \alpha_i Y_{t-1} + \sum_{i=1}^n \beta_i X_{t-1} + e_{1t}$$

$$X_t = \sum_{i=1}^n \gamma_i X_{t-1} + \sum_{i=1}^n \lambda_i Y_{t-1} + e_{2t}$$

Menurut Granger untuk menyelesaikan model kausalitas

antara X dan Y diatas, ada empat model regresi yang harus dihitung. Dua model regresi dihitung untuk menguji apakah X mempengaruhi Y dimana persamaannya adalah sebagai berikut:

Persamaan *unrestricted*:

$$Y_t = \sum_{i=1}^n \alpha_i Y_{t-1} + \sum_{i=1}^n \beta_i X_{t-1} + e_{1t}$$

Persamaan *restricted*:

$$Y_t = \sum_{i=1}^n \gamma_i Y_{t-1} + e_{2t}$$

Selanjutnya, dua model regresi dihitung untuk menguji apakah Y mempengaruhi X dimana persamaannya adalah sebagai berikut:

Persamaan *unrestricted*:

$$X_t = \sum_{i=1}^n \alpha_i X_{t-1} + \sum_{i=1}^n \beta_i Y_{t-1} + e_{1t}$$

Persamaan *restricted*:

$$X_t = \sum_{i=1}^n \gamma_i X_{t-1} + e_{2t}$$

Untuk mengambil keputusan apakah X mempengaruhi Y atau sebaliknya digunakan uji F. Nilai F diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$F = (n - k) \frac{(RSS_R - RSS_{UR})}{m(RSS_{UR})}$$

dimana:

RSSR dan RSSUR = berturut-turut adalah nilai *Residual Sum of Square* di dalam persamaan restricted dan unrestricted.

n = Jumlah observasi

m = Jumlah lag

k = Jumlah parameter yang diestimasi di dalam persamaan *unrestricted*.

Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka X mempengaruhi Y , demikian sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa hasil model persamaan kausalitas Granger sangat sensitif terhadap panjangnya periode waktu yang digunakan dalam model, sehingga interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati.

3.5. Analisis Regresi Data Panel

Selain analisis deskriptif (tabel dan grafik), untuk melihat keterkaitan antara kemiskinan, ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan digunakan pula analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan analisis data panel. Secara umum, data panel dicirikan oleh T periode waktu ($t=1,2,\dots,T$) yang kecil dan N jumlah individu ($i=1,2,\dots,N$) yang besar. Namun tidak menutup kemungkinan sebaliknya, yakni data panel terdiri dari periode waktu yang besar dan jumlah individu yang kecil. Dalam model ini, data yang digunakan bersifat *balanced panels* dimana setiap unit individu mempunyai jumlah observasi yang sama, sehingga total observasi yang dimiliki adalah sejumlah N (jumlah provinsi) dikalikan T (jumlah periode).

Menurut Baltagi dalam Gujarati (2003) dan Widarjono (2005), ada beberapa keuntungan analisis regresi yang menggunakan data panel, yaitu:

1. Data panel yang merupakan gabungan data *time series* dan data *cross section* mampu menyediakan data yang lebih

banyak, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap. Dengan demikian model regresi yang diperoleh akan memiliki *degree of freedom (df)* yang lebih besar sehingga estimasi yang dihasilkan akan lebih baik.

2. Dengan menggabungkan informasi dari data *time series* dan data *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted variable*).
3. Data panel mampu mengurangi kolinearitas antar variabel.
4. Data panel lebih baik dalam mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak mampu dilakukan oleh data *time series* murni atau data *cross section* murni.
5. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data yang diobservasi lebih banyak.

Kelebihan lain dari analisis regresi data panel adalah mengenai fleksibilitas yang lebih besar bagi peneliti dalam memodelkan perbedaan perilaku di antara individu-individu yang diobservasi (Greene, 2000). Analisis regresi yang menggunakan data panel mempunyai tiga macam model, yaitu model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Model *common effect* merupakan model yang paling sederhana, yaitu hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* dalam bentuk *pooled*. Sementara dalam model *fixed effect* diasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepnya. Intersep pada setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi. Yang terakhir adalah *random effect*, dalam model ini kita akan memilih estimasi data panel dimana residual mungkin

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Sehingga model ini mengasumsikan bahwa setiap individu mempunyai perbedaan intersep yang merupakan variabel random atau stokastik.

Untuk menguji mana yang lebih baik maka akan digunakan uji F (menguji apakah *fixed effect* lebih baik dari *common effect*), uji LM (untuk menguji apakah *random effect* lebih baik dari *common effect*) dan uji Hausman (untuk menguji mana yang lebih baik antara *random effect* dan *fixed effect*).

Model regresi yang dipakai dalam laporan ini didasarkan atas model yang dikembangkan oleh Xin Meng dkk pada tahun 2005 dalam penelitiannya yang berjudul "*Poverty, Inequality, and Growth in Urban China, 1986-2000*", sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Log } PO_{it} = & \beta_0 + \beta_1 * \text{Log}(PDRBHK_{it}) + \beta_2 * \text{Log}(Gini_{it}) + \\ & \beta_3 * \text{Log}(TPT_{it}) + \beta_4 * \text{Log}(IHKM_{it}) + \\ & \beta_5 * \text{Log}(RNM_{it}) + e \end{aligned}$$

dimana:

P0 = % penduduk miskin (Head Count Index).

PDRBHK = Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan.

Gini = Gini rasio

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

IHKM = Indeks Harga Konsumen kelompok Makanan.

RNM = Rasio Konsumsi Non Makanan terhadap Total Konsumsi.

i = Provinsi ke-i

t = Tahun pengamatan (2002-2007)

BAB 4

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

<http://www.kips.id>

4.1. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita merupakan indikator perekonomian yang sering dipakai untuk mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Meskipun demikian, banyak ahli ekonomi yang kurang sepakat karena banyak faktor-faktor lain diluar pendapatan yang dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Dudley Seers, setidaknya ada tiga masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di berbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan berarti apabila diikuti oleh pemerataan atas hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin.

Secara umum kinerja perekonomian Indonesia selama periode 2004-2008 menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Ekonomi tumbuh 5,0 persen pada tahun 2004 dan terus meningkat hingga mencapai 6,1 persen pada tahun 2008. Meskipun demikian, jika diteliti lebih mendalam gambaran yang muncul tidaklah terlalu menggembirakan. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 9,86 persen pada tahun 2004 menjadi 10,45 persen pada tahun 2006 meskipun kemudian turun lagi menjadi 8,46 persen (sekitar 9,43 juta orang) pada tahun 2008. Disisi lain, persentase penduduk miskin turun pada periode 2004-2005 namun naik lagi dari 15,97 persen pada tahun 2005 menjadi 17,75 persen pada tahun 2006. Selain itu tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Koefisien Gini mempunyai kecenderungan meningkat

pada periode yang sama. Koefisien Gini merambat naik dari 0,329 pada tahun 2004 menjadi 0,376 pada tahun 2007 meskipun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan kembali hingga mencapai 0,357 pada tahun 2009 (lihat Tabel 4.1). Pertanyaan yang kemudian sering diajukan adalah mengapa pertumbuhan ekonomi seolah-olah lepas kaitan dan tidak membawa dampak yang positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.

Teori dasar ekonomi menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dan kemiskinan. Bila pertumbuhan ekonomi membaik, maka akan terjadi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang ada tidak sesederhana itu. Blank and Card (1993) yang melakukan studi di Amerika Serikat menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa kini menjadi kurang sensitif terhadap penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan situasi tahun 1960an. Penelitian Formby et al (2001) memberikan kesimpulan yang sama yaitu dampak pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terhadap pengurangan kemiskinan menurun. Riset yang dilakukan Torm (2003) di enam negara bekas Uni Soviet menghasilkan temuan yang cukup komprehensif. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan hanya terjadi di tiga dari enam negara yang diteliti. Supaya berdampak positif, pertumbuhan ekonomi harus *employment-intensive*, sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemiskinan.

Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan tidak terjadi seketika, tetapi ada *time lag* yang lamanya tergantung pada situasi perekonomian di negara yang bersangkutan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari berbagai penelitian tersebut adalah ada hubungan yang jelas dan langsung antara penurunan ekonomi dan peningkatan kemiskinan, namun hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penurunan tingkat kemiskinan kurang jelas dan tidak langsung.

Dengan memperhatikan struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia, banyak pengamat ekonomi termasuk mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berkualitas karena belum mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan (Media Indonesia, 20/7). Akibatnya, harapan adanya hubungan yang linear antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi ekonomi di masyarakat belum terwujud.

Indikasi kurang berkualitasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2004-2008, dapat dilihat dari kesenjangan pertumbuhan sektoral yang cenderung semakin melebar antara sektor perdagangan, komunikasi dan jasa dengan sektor riil (industri manufaktur, pertanian dan pertambangan). Sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja dan mempunyai kontribusi yang besar dalam pembentukan PDB, tumbuh lambat dan berada di bawah pertumbuhan PDB. Sebaliknya, sektor perdagangan, komunikasi dan jasa menunjukkan pertumbuhan yang selalu lebih tinggi dari PDB.

Tabel 4.1.
Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Gini
Ratio 2004-2009

Variabel	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	5,7	5,5	6,3	6,1	4,2
Menurut Lapangan Usaha:						
Pertanian	2,8	2,7	3,4	3,4	4,8	3,4
Pertambangan dan Penggalian	-4,5	3,2	1,7	2,0	0,5	4,1
Industri Pengolahan	6,4	4,6	4,6	4,7	3,7	1,4
Perdagangan, Hotel, Restoran	5,7	8,3	6,4	8,4	7,2	-0,2
Pengangkutan dan Komunikasi	13,4	12,8	14,2	14,0	16,7	17,6
Keuangan, RE, Jasa Perusahaan	7,7	6,7	5,5	8,0	8,2	5,5
Menurut Penggunaan:						
Konsumsi Rumah Tangga	5,0	4,0	3,2	5,0	5,3	5,2
Konsumsi Pemerintah	4,0	6,6	9,6	3,9	10,4	15,1
PMTB	14,7	10,9	2,6	9,4	11,7	3,4
Ekspor	13,5	16,6	9,4	8,5	9,5	-14,1
Pengangguran						
Angkatan Kerja (juta orang)	104,0	105,8	106,28	108,13	111,48	113,74
Bekerja	93,7	94,9	95,18	97,58	102,05	104,49
Menganggur	10,3	10,9	11,1	10,55	9,43	9,26
Setengah Pengangguran (juta orang)	27,9	29,60	29,92	30,24	30,64	31,36
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,86	10,26	10,45	9,75	8,46	8,14
Kemiskinan						
Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	36,10	35,10	39,30	37,17	34,96	32,53
Kota	11,40	12,40	14,49	13,56	12,77	11,91
Pedesaan	24,80	22,70	24,81	23,61	22,19	20,62
Persentase Penduduk Miskin (%)	16,66	15,97	17,75	16,58	15,42	14,15
Kota	12,13	11,68	13,47	12,52	11,65	10,72
Pedesaan	20,11	19,98	21,81	20,37	18,93	17,35
Gini Ratio	0,329	0,343	0,357	0,376	0,368	0,357

Catatan:

* Triwulan I-III 2009 thd Triw I-III 2008

Dengan pola yang sangat kontras ini, sulit untuk mengharapkan pertumbuhan sektoral dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap penyerapan tenaga kerja, penurunan angka pengangguran, kemiskinan dan perbaikan ketimpangan pendapatan.

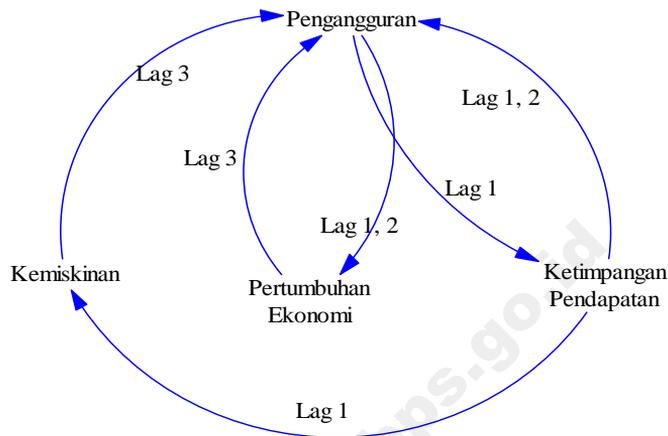
Indikasi lain yang dapat digunakan untuk melihat kurang berkualitaskannya pertumbuhan ekonomi adalah dengan mencermati komponen pertumbuhan ekonomi (PDB) menurut penggunaannya. Ada empat komponen yang membentuk PDB yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Selama periode 2004-2008, komponen penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga yaitu sekitar 61-67 persen. Sebaliknya sumbangan komponen investasi terhadap pembentukan PDB hanya berkisar 22-28 persen, relatif kecil bila dibandingkan dengan Vietnam (sekitar 32 persen) dan China (sekitar 40 persen). Minimnya kontribusi dan pertumbuhan komponen investasi ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan penambahan jumlah angkatan kerja.

Besarnya peranan konsumsi rumah tangga terhadap pembentukan PDB ini cenderung tidak sehat mengingat komponen yang seharusnya dipacu adalah investasi. Peningkatan konsumsi hanya dapat meningkatkan produksi yang bisa menyerap tenaga kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat selama barang-barang yang dikonsumsi adalah produksi dalam negeri. Namun di era perdagangan bebas seperti sekarang ini, sangat besar kemungkinannya bahwa barang-barang yang dikonsumsi

masyarakat adalah barang-barang yang berasal dari luar negeri. Kalau hal ini yang terjadi, maka peningkatan konsumsi masyarakat tidak akan membawa dampak pada ekspansi produksi sehingga angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Dengan demikian, untuk menjawab tantangan agar pertumbuhan ekonomi dapat memperluas lapangan kerja sehingga menurunkan pengangguran dan kemiskinan, upaya yang harus dilakukan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan mendorong investasi, khususnya di sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian dan industri manufaktur. Tanpa adanya investasi barang modal, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah keniscayaan.

Untuk melihat secara sepintas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, dilakukan uji kausalitas Granger. Uji ini dilakukan dengan mengamati perilaku siklikal (*cyclical behaviour*) keempat komponen tersebut dalam suatu periode tertentu. Hasil dari uji kausalitas tersebut disajikan dalam Gambar 4.1 untuk 3 lag waktu, yaitu lag 1, lag 2 dan lag 3. Hasil uji kausalitas ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati karena jumlah observasi yang digunakan sangat terbatas.

Gambar 4.1.
Hasil Uji Kausalitas Granger antara Pertumbuhan Ekonomi,
Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan
Periode 1999-2009



Gambaran ringkas dari hasil uji tersebut adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi lepas kaitan dengan masalah kemiskinan baik untuk lag 1, lag 2, maupun lag 3.
- Pada lag 1, ketimpangan pendapatan akan menyebabkan kemiskinan pada tingkat kesalahan (α) = 10 persen, namun kemiskinan tidak menyebabkan ketimpangan pendapatan.
- Pada lag 1, pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat kesalahan (α) = 5 persen namun tidak terjadi sebaliknya.
- Pada lag 1, ketimpangan pendapatan akan menyebabkan pengangguran pada tingkat kesalahan (α) = 5 persen, demikian pula pengangguran akan menyebabkan ketimpangan pendapatan pada α = 10 persen. Dengan demikian pada lag 1

terjadi hubungan kausalitas antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

- Pada lag 2, pengangguran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat kesalahan (α) = 10 persen namun tidak terjadi sebaliknya.
- Pada lag 2, ketimpangan pendapatan akan mempengaruhi pengangguran pada tingkat kesalahan (α) = 10 persen namun tidak terjadi sebaliknya.
- Pada lag 3, kemiskinan akan menyebabkan pengangguran pada $\alpha = 10$ persen namun tidak terjadi sebaliknya.
- Pada lag 3, pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan pengangguran pada $\alpha = 10$ persen namun tidak terjadi sebaliknya.

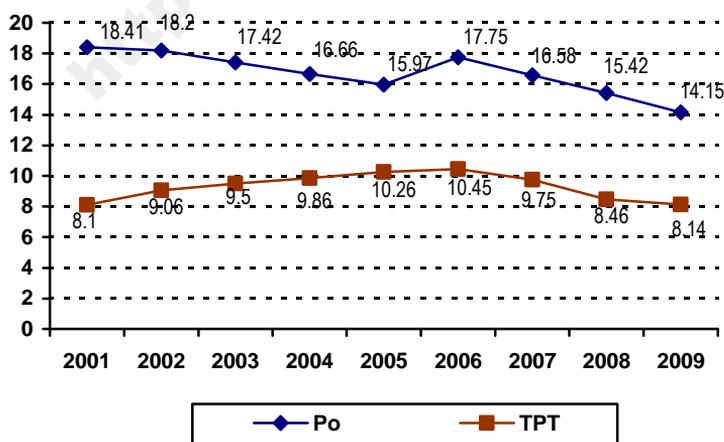
4.2. Hubungan Antara Kemiskinan Dan Ketenagakerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah pengangguran. Komisi Kemiskinan Dunia (*The Poverty Commission*) menyebutkan bahwa pengangguran merupakan penyebab utama kemiskinan dan disebutkan bahwa pada tahun 1972-73 sekitar seperenam (16,6 persen) dari penduduk yang tidak bekerja hidup di bawah garis kemiskinan (Saunders, 2002). Pengangguran dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan implikasinya bukan hanya terhadap si penganggur, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Selain menimbulkan konsekuensi kemiskinan, pengangguran juga berkontribusi terhadap

ketimpangan distribusi pendapatan.

Banyak literatur yang menyatakan ada hubungan yang erat antara pengangguran dan kemiskinan, tetapi untuk membuktikannya secara empiris tidaklah mudah. Untuk melihat hubungan antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, para analis biasanya menggunakan dua sumber data. Data kemiskinan dihitung dari hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang datanya dikumpulkan setiap bulan Maret, sementara data pengangguran diperoleh dari hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang pengumpulan datanya dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus. Gambar 4.2 menyajikan perkembangan persentase penduduk miskin (Po) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tingkat nasional selama periode 2001-2009.

Gambar 4.2.
Persentase Penduduk Miskin (Po) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, 2001-2009



Sumber: BPS (Susenas dan Sakernas kondisi Februari)

Gambar 4.3.
Hubungan antara perubahan persentase penduduk Miskin (Po) dan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2001-2009



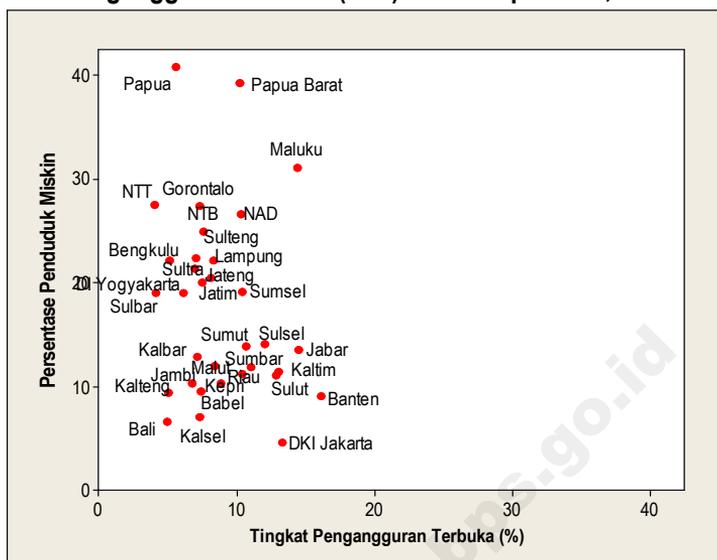
Sumber: BPS (Susenas dan Sakernas kondisi Februari)

Selama periode 2001-2006, tingkat pengangguran di Indonesia cenderung meningkat yaitu dari 8,10 persen pada tahun 2001 menjadi 10,45 persen pada tahun 2006 dan mulai tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan hingga mencapai 8,14 persen pada Februari 2009. Peningkatan pengangguran selama periode 2001-2006 ternyata tidak diikuti oleh peningkatan persentase penduduk miskin, bahkan sebaliknya terjadi penurunan tingkat kemiskinan selama periode 2001-2005. Ketika tingkat pengangguran naik tipis dari 10,26 persen pada tahun 2005 menjadi 10,45 persen pada tahun 2006, tingkat kemiskinan naik cukup tajam yaitu dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen akibat kenaikan harga BBM. Adanya kecenderungan hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan baru terlihat pada periode 2006-2009. Dalam periode ini penurunan tingkat pengangguran diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Fenomena ini juga tercermin pada Gambar 4.3 yang

menunjukkan hubungan antara perubahan kemiskinan dan perubahan pengangguran, dimana selama periode 2006-2009 seluruh hubungan tersebut terletak di kuadran tiga yang berarti penurunan kemiskinan berjalan searah dengan penurunan pengangguran. Meskipun demikian, selama periode 2001-2009 mayoritas hubungan terletak di kuadran dua, yang menggambarkan bahwa peningkatan pengangguran justru diiringi penurunan kemiskinan.

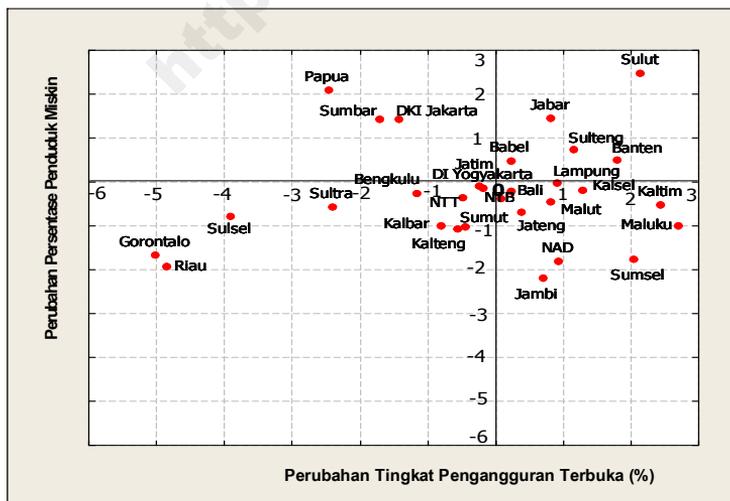
Lemahnya hubungan antara pengangguran dan kemiskinan terlihat lebih nyata pada level provinsi seperti yang tercermin pada Gambar 4.4. Pada tahun 2007, di beberapa provinsi seperti Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan cenderung ada hubungan yang cukup kuat antara pengangguran dan kemiskinan, tetapi di provinsi-provinsi seperti Papua, Papua Barat, NTT, Gorontalo, NAD dan Maluku, tingkat kemiskinan nampak sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat penganggurannya. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta dan Banten nampak terlalu rendah dibandingkan tingkat penganggurannya. Gambar 4.5 yang menunjukkan hubungan perubahan tingkat pengangguran dan kemiskinan selama periode 2004-2007 memberikan indikasi yang sama. Hanya separuh dari seluruh provinsi di Indonesia yang terletak di kuadran satu dan tiga, menunjukkan adanya hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan. Separuh provinsi lainnya menyebar di kuadran dua dan empat, menunjukkan tak ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan karena masing-masing variabel bergerak pada arah yang berlawanan.

Gambar 4.4.
Hubungan antara persentase penduduk Miskin (Po) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut provinsi, 2007



Sumber: BPS (Susenas dan Sakernas kondisi Februari)

Gambar 4.5.
Hubungan antara perubahan persentase penduduk Miskin (Po) dan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut provinsi, 2004-2007



Sumber: BPS (Susenas dan Sakernas kondisi Februari)

Kesulitan untuk menunjukkan adanya hubungan yang positif antara tingkat pengangguran dan kemiskinan secara empiris tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain, seperti contoh kasus yang digambarkan Saunders (2002). Kasus pertama adalah pengalaman di Finlandia pada awal tahun 1990. Kombinasi dari resesi dan kejatuhan Uni Soviet yang merupakan mitra dagang utama bagi Finlandia menyebabkan tingkat pengangguran di Finlandia meningkat beberapa kali lipat yaitu dari 3,2 persen pada tahun 1991 menjadi 16,3 persen pada tahun 1993. Peningkatan pengangguran yang tajam ini ternyata tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan karena tingkat kemiskinan relatif tidak berubah pada periode yang sama. Dari hasil penelusuran terhadap konsep dan metodologi yang digunakan, salah satu penyebab tidak nampaknya hubungan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan di Finlandia karena konsep kemiskinan yang digunakan adalah kemiskinan relatif, dimana tingkat kemiskinan diukur berdasarkan setengah median pendapatan. Akibatnya tingkat kemiskinan justru sedikit menurun selama periode 1991-1994 karena garis kemiskinan turun seiring dengan menurunnya median pendapatan.

Contoh kasus yang kedua adalah pengalaman di Amerika dimana para peneliti mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Amerika lepas kaitan dengan keadaan ekonomi pada tahun 1970an dan terutama tahun 1980an (Haveman, 2000). Pada tahun 1970an tingkat kemiskinan meningkat meskipun tingkat pengangguran menurun. Keadaan yang sama juga terlihat pada pertengahan tahun 1990an. Berbeda dengan pengalaman di Finlandia, dimana

peningkatan pengangguran tidak diikuti oleh perubahan tingkat kemiskinan, di Amerika Serikat pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran justru diikuti oleh peningkatan kemiskinan. Para peneliti menyimpulkan bahwa situasi ini terjadi karena sistem kesejahteraan yang ada, tetapi penyebab yang utama adalah semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan.

Dengan demikian ada banyak alasan mengapa tingkat pengangguran dan kemiskinan kadang kala tidak berjalan searah bahkan seringkali bergerak kearah yang berlawanan. Selain karena alasan-alasan dari sisi ekonomi, masalah konsep dan metodologi yang digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran dan kemiskinan juga membuat upaya untuk meneliti hubungan kedua variabel tersebut semakin rumit. Menurut Saunders (2002) beberapa masalah yang berkaitan dengan konsep dan metodologi adalah sebagai berikut:

- a. Data pengangguran dan kemiskinan biasanya diperoleh dari dua sumber data dengan waktu pengumpulan dan responden yang berbeda. Di Indonesia, data pengangguran diperoleh dari Sakernas yang pengumpulan datanya dilakukan secara semesteran (bulan Februari dan Agustus), sementara data kemiskinan dihitung dari Susenas yang pengumpulan datanya dilakukan bulan Maret. Unit sampling Susenas dan Sakernas sama-sama rumah tangga, tetapi unit analisis Sakernas adalah individu sementara unit analisis Susenas modul konsumsi adalah rumah tangga. Adanya time lag antara dua sumber data dan perbedaan unit analisis ini membuat upaya untuk membuat

kajian hubungan antara pengangguran dan kemiskinan menjadi rumit.

- b. Kemiskinan biasanya diukur dari pendapatan/ pengeluaran yang merupakan "flow variable" sementara pengangguran merupakan "stock variable" yang mengamati status angkatan kerja seseorang pada titik tertentu (satu minggu yang lalu). Perbedaan konsep ditambah time lag dapat menyebabkan seseorang dikategorikan penganggur pada saat pencacahan, tetapi bukan penganggur di waktu yang lain sehingga dia mempunyai pendapatan yang berada diatas garis kemiskinan dan tidak digolongkan sebagai miskin.
- c. Kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebuah rumah tangga. Seseorang yang menganggur dan tidak mempunyai pendapatan, tidak otomatis menjadi miskin apabila dalam rumah tangga tersebut ada anggota rumah tangga yang lain yang bekerja dengan penghasilan yang cukup tinggi, sehingga rata-rata pendapatan/pengeluaran per kapita rumah tangga tersebut berada diatas garis kemiskinan.

Untuk lebih mencermati kaitan antara tingkat kemiskinan dan pengangguran (ketenagakerjaan), dalam analisis ini digunakan satu sumber data yaitu data panel Susenas tahun 2005-2007. Dengan menggunakan sumber data yang sama, masalah teknis seperti perbedaan waktu pencacahan dan perbedaan unit analisis dapat dihilangkan. Ada 4 kombinasi hubungan antara ketenagakerjaan (pengangguran) dan kemiskinan, yaitu (1) orang yang menganggur

dan berstatus miskin (2) menganggur namun tidak miskin (3) bekerja namun masih berstatus miskin (4) bekerja dan tidak berstatus miskin. Dalam bagian ini akan dilihat bagaimana situasi kemiskinan dan ketenagakerjaan di Indonesia jika dilihat dari keempat hubungan tersebut.

Tabel 4.2 menyajikan distribusi angkatan kerja menurut status kemiskinan dan pekerjaannya. Pada tahun 2005 dari seluruh angkatan kerja yang menganggur, tercatat hanya 16,97 persen berstatus miskin. Angka tersebut naik menjadi 19,91 persen pada tahun 2006 dan sekitar 17,54 persen pada tahun 2007. Persentase angkatan kerja yang menganggur dan berstatus miskin ini hampir sama dengan temuan Komisi Kemiskinan Dunia yang menyatakan bahwa sekitar seperenam (16,6 persen) dari penduduk yang tidak bekerja hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun demikian, dengan memperhatikan anggapan umum bahwa orang yang menganggur umumnya miskin, persentase ini bisa dinilai terlalu rendah sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Seperti dijelaskan sebelumnya, rendahnya persentase ini kemungkinan besar disebabkan oleh cara penghitungan kemiskinan dimana kemiskinan dihitung dengan menggunakan rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita dalam sebuah rumah tangga. Seseorang yang menganggur (tidak mempunyai pendapatan) bisa tidak berstatus miskin selama ada anggota rumah tangga lain yang bekerja dan mempunyai pendapatan yang cukup tinggi sehingga rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita berada di atas garis kemiskinan.

Tabel 4.2.
Distribusi Angkatan Kerja Menurut Status Miskin dan Pekerjaan
Tahun 2005-2007 (dalam %) ^{*)}

Status Miskin	2005		2006		2007	
	Bekerja	Menganggur	Bekerja	Menganggur	Bekerja	Menganggur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Miskin	14,93	16,97	16,83	19,91	16,34	17,54
Tidak Miskin	85,07	83,03	83,17	80,09	83,66	82,46
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Susenas Panel 2005, 2006, dan 2007

Catatan: *) Distribusi persentase terhadap masing-masing Bekerja dan Menganggur (100 persen kebawah)

Dengan demikian salah satu karakteristik demografis yang berpengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan adalah jumlah anggota keluarga dan tingkat beban tanggungan (*dependency ratio*) yang menggambarkan jumlah tanggungan dari setiap orang yang bekerja. Tingkat beban tanggungan dihitung dari ratio antara jumlah seluruh anggota rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja.

Rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumahtangga yang lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Berdasarkan hasil Susenas 2007, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin adalah 4,74 orang sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tidak miskin hanya 3,97 orang. Data ini menunjukkan bahwa jumlah beban tanggungan rumah tangga miskin lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Secara

umum setiap anggota rumah tangga miskin yang bekerja rata-rata menanggung 4,74 jiwa, sedangkan rumah tangga tidak miskin hanya 3,97 jiwa. Sangat dominannya variabel jumlah anggota rumah tangga dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan dapat dilihat dari Tabel 4.3. Tingkat kemiskinan untuk penduduk yang menganggur meningkat pesat seiring dengan meningkatnya jumlah anggota rumah tangga. Misalnya pada tahun 2006, tingkat kemiskinan untuk penduduk yang menganggur dengan jumlah anggota rumah tangga dua orang hanya 3,17 persen, lalu meningkat menjadi 6,23 persen apabila jumlah ARTnya tiga orang, dan melonjak menjadi 24,54 persen pada saat ARTnya lima orang. Dengan demikian upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dari sisi ekonomi saja. Program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk membatasi jumlah anggota rumah tangga merupakan salah satu kebijakan penting yang juga harus ditempuh dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Dari Tabel 4.2 juga terlihat bahwa penduduk yang bekerja tetapi berstatus miskin persentasenya cukup besar, yaitu 14,93 persen pada tahun 2005, kemudian naik menjadi 16,83 persen pada tahun 2006 dan 16,34 persen pada tahun 2007. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan mereka dari bekerja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Banyak faktor yang terkait dengan ketenagakerjaan dapat menjadi penyebab adanya sekelompok penduduk yang bekerja namun tetap miskin, salah satu faktor diantaranya adalah jumlah jam kerja.

Tabel 4.3.
Persentase Pengangguran Yang Miskin Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) Tahun 2005-2007

Jumlah ART (orang)	Persentase Pengangguran Miskin		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
1	-	-	0,30
2	3,84	3,17	3,77
3	6,97	6,23	10,50
4	11,69	17,49	20,04
5	26,02	24,54	19,35
6	20,33	20,80	25,20
≥ 7	31,14	27,77	20,84
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Susenas Panel 2005, 2006, dan 2007

Tabel 4.4.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Kemiskinan Tahun 2005-2007

Status Miskin	Bekerja 2005			Bekerja 2006			Bekerja 2007		
	< 35 jam	≥ 35 jam	Jumlah	< 35 jam	≥ 35 jam	Jumlah	< 35 jam	≥ 35 jam	Jumlah
Miskin	17,41	13,63	14,93	21,72	14,32	16,83	19,09	14,79	16,34
Tidak Miskin	82,59	86,37	85,07	78,28	85,68	83,17	80,91	85,21	83,66
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Susenas Panel 2005, 2006, dan 2007

Berdasarkan jumlah jam kerjanya, penduduk yang bekerja dapat dibedakan menjadi dua yaitu penduduk yang bekerja dengan jam kerja normal (≥ 35 jam seminggu) dan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu (biasa disebut setengah penganggur).

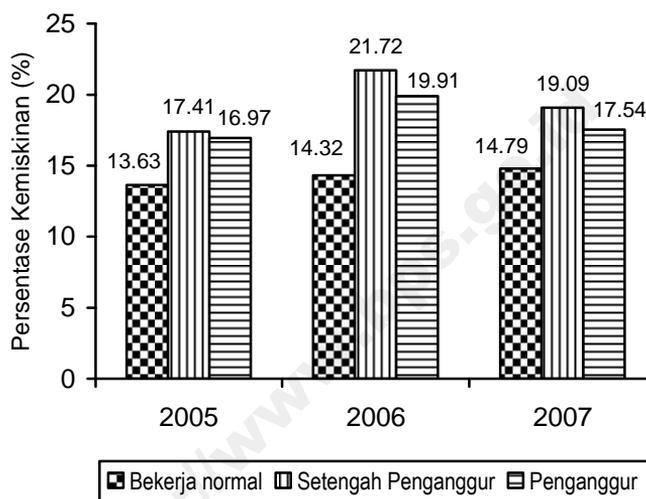
Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan disebut Setengah Penganggur Terpaksa, sementara mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain disebut Setengah Penganggur Sukarela (sebagian pihak menyebut mereka sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*). Kelompok setengah pengangguran sukarela ini tidak ingin menerima pekerjaan yang sebenarnya bisa mereka peroleh, karena mereka memiliki cara atau sumber lain untuk menopang hidupnya. Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa persentase kemiskinan untuk kelompok setengah penganggur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang bekerja dengan jam kerja normal. Pada tahun 2005 persentase kemiskinan untuk kelompok setengah penganggur mencapai 17,41 persen, lalu naik menjadi 21,72 persen pada tahun 2006 dan turun sedikit menjadi 19,09 persen pada tahun 2007.

Gambar 4.6 membandingkan persentase kemiskinan untuk kelompok penganggur, setengah penganggur dan bekerja dengan jam kerja normal. Dari Gambar 4.6 terlihat bahwa menjadi penganggur berasosiasi dengan meningkatnya resiko menjadi miskin meskipun hubungan antara keduanya lemah, dalam arti tidak semua penganggur otomatis menjadi miskin karena persentase penganggur yang berstatus miskin hanya berkisar antara 16,97-19,91 persen dan tidak semua orang miskin adalah penganggur. Kelompok setengah penganggur ternyata juga beresiko besar untuk menjadi miskin, terlihat dari persentase kemiskinan yang cukup tinggi pada kelompok

ini yaitu antara 17,41-21,72 persen. Dengan demikian, usaha pengentasan kemiskinan juga harus memperhatikan kelompok setengah penganggur. Kelompok ini menjadi setengah penganggur karena berbagai alasan.

Gambar 4.6.

Persentase Kemiskinan Menurut Status Pekerjaan, 2005-2007

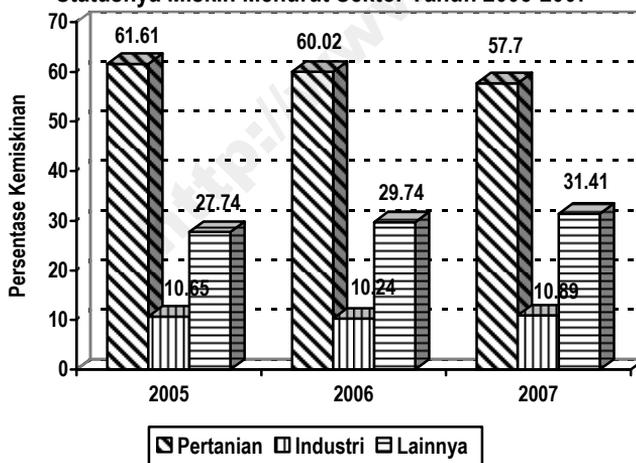


Sumber: Susenas panel 2005, 2006, dan 2007

Selain faktor jumlah jam kerja yang menyebabkan adanya sekelompok penduduk yang bekerja namun tetap miskin, faktor lain yang berpengaruh adalah sektor dimana penduduk tersebut bekerja. Gambar 4.7 menyajikan distribusi penduduk yang bekerja dan statusnya miskin menurut sektor. Pada tahun 2005 penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan statusnya miskin mencapai 61,61 persen. Angka tersebut turun menjadi 60,02 persen pada tahun 2006 dan sekitar 57,70 persen pada tahun 2007. Penduduk yang bekerja di sektor industri dan statusnya miskin tercatat hanya 10,65 persen lalu

turun menjadi 10,24 persen pada tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 10,89 persen pada tahun 2007. Kemudian penduduk yang bekerja di sektor lainnya dan statusnya miskin pada tahun 2005 tercatat 27,74 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 29,74 persen pada tahun 2006 dan 31,41 persen pada tahun 2007. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penduduk yang bekerja tetapi berstatus miskin terbanyak bekerja di sektor pertanian sedangkan sisanya di sektor industri dan lainnya. Data ini menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya sekelompok penduduk yang bekerja namun tetap miskin terutama yang bekerja di sektor pertanian.

Gambar 4.7.
Distribusi Angkatan Kerja Yang Bekerja dan Statusnya Miskin Menurut Sektor Tahun 2005-2007



Sumber: Susenas panel 2005, 2006, dan 2007

Tabel 4.5 menyajikan persentase kemiskinan pada masing-masing kelompok sektor pekerjaan dan jam kerjanya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat kemiskinan yang paling tinggi

ada di sektor pertanian. Pada tahun 2007 tingkat kemiskinan di sektor pertanian tercatat paling tinggi dibanding sektor lainnya yaitu sebesar 23,28 persen. Hal ini berarti bahwa ada sekitar 23,28 persen dari seluruh penduduk yang bekerja di sektor pertanian berstatus miskin. Sementara untuk sektor di luar pertanian angkanya lebih rendah yaitu masing-masing sebesar 16,48 persen untuk sektor industri dan 10,53 persen untuk sektor lainnya. Pola tersebut tidak berbeda jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya (2005 dan 2006). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya sekelompok penduduk yang bekerja namun tetap miskin terutama yang bekerja di sektor pertanian.

Bila dilihat dari jam kerja di masing-masing sektor, hampir di semua sektor tingkat kemiskinan untuk kelompok setengah penganggur (bekerja < 35 jam per minggu) lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang bekerja dengan jam kerja normal, kecuali di sektor pertanian untuk tahun 2005. Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan untuk kelompok setengah penganggur di sektor pertanian hanya 20,27 persen, lebih kecil dibanding dengan kelompok yang bekerja dengan jam kerja normal yaitu sekitar 24,78 persen. Fakta ini juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan bisa dipengaruhi oleh jumlah jam kerja per minggu.

Tabel 4.5.
Persentase Penduduk Bekerja*) yang Statusnya Miskin) Menurut**
Sektor dan Jam Kerja Tahun 2005-2007

Sektor dan Jam Kerja	2005	2006	2007
Pertanian			
< 35 Jam	20,27	25,64	23,45
≥ 35 Jam	24,78	25,17	23,11
Total	22,47	25,41	23,28
Industri			
< 35 Jam	20,44	20,18	20,58
≥ 35 Jam	10,16	11,48	15,18
Total	12,21	13,19	16,48
Lainnya			
< 35 Jam	11,14	14,75	11,98
≥ 35 Jam	8,34	9,35	10,00
Total	9,00	10,60	10,53
Jumlah	14,93	16,83	16,34

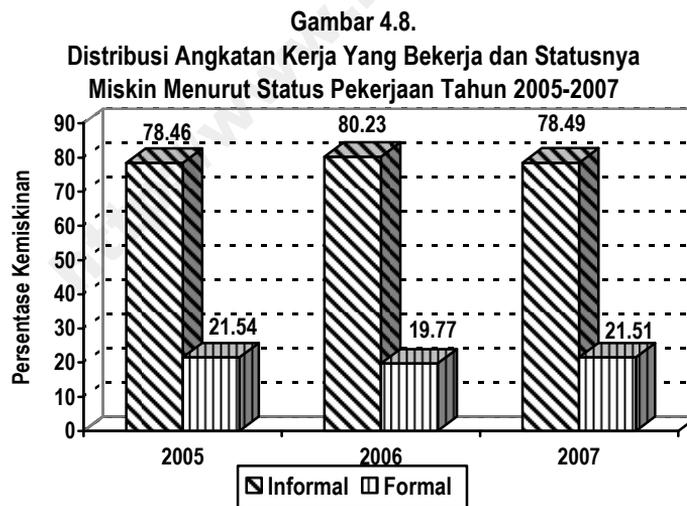
Sumber: Susenas panel 2005, 2006, dan 2007

Catatan : *) Angkatan Kerja usia 15+ tahun..

**) Ukuran Head Count Index

Faktor lainnya yang menyebabkan adanya sekelompok penduduk yang bekerja namun tetap miskin, adalah status pekerjaan penduduk (formal/informal). Dari Gambar 4.8 terlihat bahwa distribusi angkatan kerja yang bekerja tetapi berstatus miskin sebagian besar statusnya sebagai pekerja informal. Misalnya berdasarkan hasil Susenas 2007, persentase penduduk pekerja informal yang statusnya miskin adalah 78,49 persen sedangkan sisanya sebesar 21,51 persen statusnya sebagai pekerja formal. Data ini

menunjukkan bahwa status pekerjaan (formal/informal) berpeluang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya sekelompok penduduk yang bekerja namun tetap miskin terutama bila status pekerjaannya sebagai pekerja informal. Pada tahun 2005 dari seluruh penduduk bekerja yang statusnya miskin tercatat 78,46 persen berstatus pekerja informal. Angka tersebut naik menjadi 80,23 persen pada tahun 2006 dan kembali turun menjadi 78,49 persen pada tahun 2007. Sementara itu, penduduk yang bekerja sebagai pekerja formal dan statusnya miskin pada tahun 2005 tercatat 21,54 persen yang kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 19,77 persen pada tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 21,51 persen pada tahun 2007.



Sumber: Susenas panel 2005, 2006, dan 2007

Tabel 4.6 menyajikan tingkat kemiskinan penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan dan jam kerja. Angka-angka pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan penduduk

berstatus pekerja yang diukur dengan *head count index* untuk pekerja informal jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja formal. Sebagai contoh berdasarkan hasil Susenas 2007, *head count index* pekerja informal adalah sekitar 19,66 persen, jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerja formal yang hanya 10,10 persen. Hal ini memberikan arti bahwa dari seluruh pekerja informal terdapat sekitar 19,66 persen yang berstatus miskin, sementara dari seluruh pekerja formal yang berstatus miskin hanya sekitar 10,10 persennya.

Fakta ini memperkuat penjelasan sebelumnya bahwa status pekerjaan (formal/ informal) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya sekelompok penduduk yang bekerja namun tetap miskin terutama bila sebagai pekerja informal. Bila melihat trennya pada tahun 2005 tercatat *head count index* pekerja informal adalah sekitar 18,41 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 21,08 persen pada tahun 2006 dan kembali turun menjadi 19,66 persen pada tahun 2007. Sementara untuk pekerja formal pada tahun 2005 tercatat *head count index* sebesar 8,84 persen lalu naik menjadi 9,25 persen pada tahun 2006 dan 10,10 persen pada tahun 2007.

Serupa dengan pola menurut sektor, menurut status pekerjaanpun menunjukkan bahwa jam kerja mempunyai pengaruh terhadap besarnya tingkat kemiskinan penduduk bekerja. Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa tingkat kemiskinan (yang diukur dengan *head count index*) kelompok setengah penganggur (bekerja < 35 jam per minggu) lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang bekerja dengan jam kerja normal. Misalnya pada tahun 2007 *head count*

index pekerja informal untuk kelompok setengah penganggur tercatat sekitar 21,11 persen, lebih besar dibanding dengan kelompok yang bekerja dengan jam kerja normal yang sebesar 18,54 persen.

Tidak berbeda jauh dengan pekerja informal, pada pekerja formalpun terlihat bahwa tingkat kemiskinan kelompok setengah penganggur lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang bekerja dengan jam kerja normal. Sebagai contoh pada tahun 2007 terlihat bahwa *head count index* kelompok pekerja formal yang bekerja < 35 jam (setengah pengangguran) mempunyai angka sebesar 11,33 persen sementara untuk kelompok dengan jam kerja normal sebesar 9,77 persen.

Tabel 4.6.

Persentase Penduduk Bekerja*) yang Statusnya Miskin) Menurut
Status Pekerjaan dan Jam Kerja Tahun 2005-2007**

Status dan Jam Kerja	2005	2006	2007
Informal			
< 35 Jam	19,35	24,15	21,11
≥ 35 Jam	17,71	18,84	18,54
Total	18,41	21,08	19,66
Formal			
< 35 Jam	10,21	12,12	11,33
≥ 35 Jam	8,50	8,58	9,77
Total	8,84	9,25	10,10
Jumlah	14,93	16,83	16,34

Sumber: Susenas Panel 2005, 2006, dan 2007

Catatan : *) Angka Kertja usia 15+ tahun..

**) Ukuran Head Count Index

4.3. Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

4.3.1. Pendahuluan

Tingkat kemiskinan suatu masyarakat erat hubungannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan (Darwis dan Nurmanaf, 2001). Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menentukan bagaimana pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat khususnya dalam mengurangi kemiskinan. Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum tetapi hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu. Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang menjadikan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan sebagai prioritas penting dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif.

Aspek distribusi pendapatan menjadi semakin menarik, terutama dikaitkan dengan masih besarnya rakyat miskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan secara implisit, langsung maupun tidak langsung terkait dengan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemerataan masih perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Banyaknya penduduk miskin merupakan cerminan ketimpangan distribusi pendapatan dan aset yang makin buruk di antara rakyat banyak selama masa pembangunan. Hal ini secara langsung mempengaruhi ketidakmerataan kesempatan kerja yang produktif. Dengan demikian, persoalan distribusi pendapatan yang dikaitkan dengan tingkat kemiskinan merupakan hal yang sangat penting, karena dapat

dijadikan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/negara.

Sejalan dengan itu, tingkat ketimpangan yang tinggi tentunya akan memberikan kontribusi kepada tingkat kemiskinan yang tinggi pula jika pembangunan ekonomi tidak banyak dinikmati oleh penduduk kalangan bawah. Banyaknya penduduk miskin merupakan cerminan ketimpangan distribusi pendapatan dan aset yang makin buruk di antara rakyat banyak selama masa pembangunan. Dalam banyak literatur yang didasarkan pada berbagai studi dan penelitian disebutkan bahwa ada hubungan yang sistematis antara tingkat distribusi pendapatan dan kemiskinan meskipun hubungan tersebut tidak berlaku umum dan berbeda antar negara/wilayah tergantung kepada karakteristik yang dimiliki masing-masing negara/wilayah seperti ketersediaan sumberdaya baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya. Salah satu studi yang menyimpulkan hal tersebut adalah studi yang dilakukan oleh Kwan Kim (1997). Melalui studinya Kim menyimpulkan bahwa di negara maju hubungan antara distribusi pendapatan dan kemiskinan diantaranya dipengaruhi oleh adanya perubahan pasar tenaga kerja dan pasar modal di dalam ekonomi domestik serta oleh adanya teknologi, perdagangan luar negeri dan keluar masuknya modal dalam konteks ekonomi global.

Studi lain yang dilakukan oleh Alain de Janvry dan Elisabeth Sadoulet pada tahun 1996 meneliti mengenai hubungan kausal antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di Amerika Latin periode 1970 dan 1994. Hubungan antara ketiga indikator tersebut ditentukan secara simultan. Hipotesis yang mereka

ajukan adalah bahwa distribusi pendapatan yang direpresentasikan oleh gini indeks dipengaruhi oleh pertumbuhan tingkat kemiskinan perkotaan dan perdesaan. Sementara pertumbuhan tingkat kemiskinan perkotaan dipengaruhi oleh pertumbuhan tingkat kemiskinan perdesaan, dan demikian sebaliknya, melalui proses migrasi. Kesimpulan dari studi mereka menunjukkan bahwa insiden kemiskinan, bila direpresentasikan oleh *headcount ratio* (persentase penduduk miskin) ternyata mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, namun ketika kemiskinan direpresentasikan dengan jumlah penduduk miskin terjadi hal yang sebaliknya yaitu kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan namun ketimpangan pendapatan tidak dipengaruhi oleh kemiskinan.

Pada penelitian yang sama, mereka juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan determinan utama sebagai penentu perubahan tingkat ketimpangan pendapatan, namun yang menjadi penentu utama adalah migrasi. Lebih lanjut, menurut hasil penelitian mereka, faktor-faktor utama yang menentukan perubahan dalam tingkat ketimpangan pendapatan adalah karakteristik negara tersebut seperti kontribusi sektor pertanian dalam PDB, komposisi penduduk perkotaan dan tingginya tingkat ketimpangan pada awal periode. Janvry dan Sadaulet juga menemukan bahwa untuk kemiskinan di perkotaan dan pedesaan ternyata bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh PDB per kapita dapat mengurangi insiden kemiskinan, namun efek pengurangan kemiskinan tersebut di *cancel out* oleh peningkatan dalam

ketimpangan pendapatan sehingga yang terjadi adalah kenaikan tingkat kemiskinan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Semoa dan Tesfa (2004) mengenai hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Virginia Barat dengan menggunakan data *cross section* dari 38 daerah pedesaan pada tahun 1980 dan 1990 menyimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara perubahan insiden kemiskinan dan perubahan ketimpangan pendapatan (direpresentasikan oleh gini rasio). Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang searah, dimana jika perubahan tingkat kemiskinan meningkat maka tingkat perubahan ketimpanganpun akan meningkat pula, demikian juga sebaliknya.

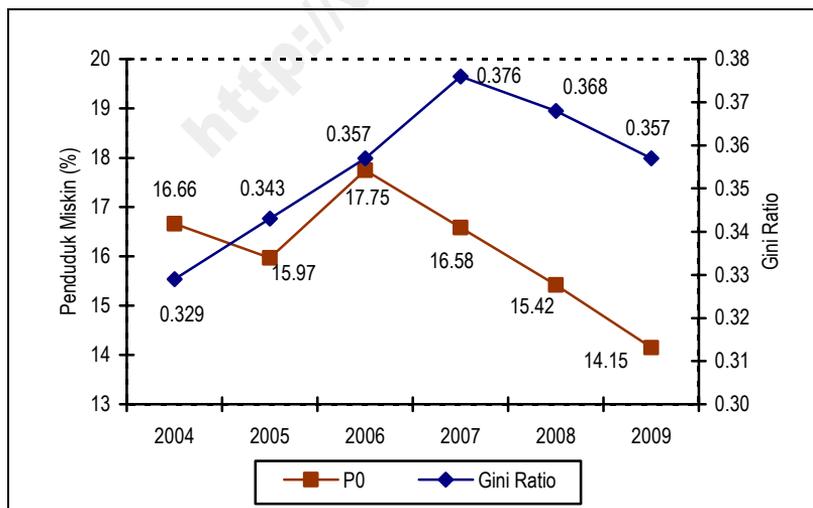
4.3.2. Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Perkembangan insiden kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan (direpresentasikan oleh Gini rasio) periode 2004-2009 disajikan pada Gambar 4.9. Meskipun banyak literatur yang menyebutkan terdapat hubungan timbal balik antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, namun untuk menyimpulkan hal tersebut untuk kasus Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati. Dari Gambar 4.9 terlihat bahwa hubungan yang searah baru terjadi pada periode 2007-2009 dimana pada periode tersebut terjadi penurunan indeks gini (gini rasio) yang diikuti oleh penurunan insiden kemiskinan. Pada periode tersebut gini rasio menurun dari 0,376 pada tahun 2007 menjadi 0,357 pada tahun 2009 dan sejalan dengan itu terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 16,58 persen

(2007) menjadi 14,15 persen (2009). Sementara itu, pada periode-periode sebelumnya, yaitu pada periode 2004-2005 dan periode 2006-2007 terdapat hubungan yang terbalik antara kemiskinan dan distribusi pendapatan. Pada periode 2004-2005, persentase penduduk miskin turun dari 16,66 persen menjadi 15,97 persen padahal gini rasio naik dari 0,329 menjadi 0,343. Sebaliknya pada periode 2006-2007, gini rasio meningkat namun persentase penduduk miskin menurun. Gambaran tersebut dapat pula dilihat pada Gambar 4.10 dimana hubungan yang searah dapat dilihat pada Kuadran I yaitu periode 2005-2006 (terjadi kenaikan baik pada gini rasio maupun persentase penduduk miskin) dan kuadran III yaitu periode 2007-2008 dan 2008-2009 (terjadi penurunan pada gini rasio dan persentase penduduk miskin).

Gambar 4.9.

Persentase Penduduk Miskin dan Gini Ratio di Indonesia, 2004-2009



Sumber: Susenas Panel 2005, 2006, dan 2007

Gambar 4.10.
Hubungan antara perubahan persentase penduduk Miskin (Po) dan perubahan Gini Ratio , 2004-2009



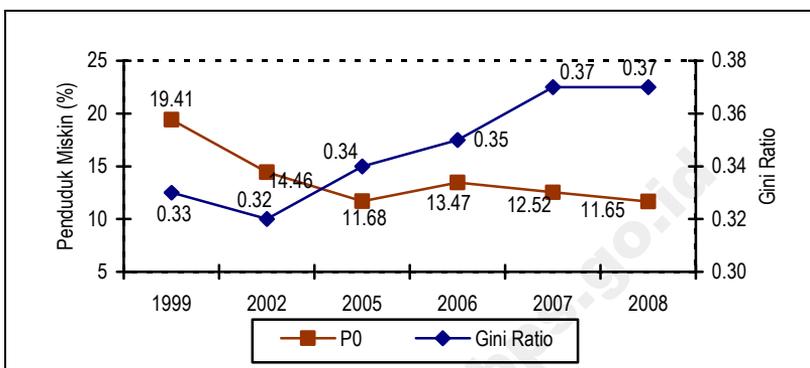
Sumber: Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan

Gambar 4.11 dan Gambar 4.12 menyajikan hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (gini rasio) masing-masing di daerah perkotaan dan perdesaan. Dari kedua Gambar tersebut terlihat bahwa hubungan antara kemiskinan dan distribusi pendapatan di kedua daerah perkotaan dan perdesaan mempunyai pola yang serupa kecuali pada periode 1999-2002. Pada periode 1999-2002, di perkotaan hubungan antara kemiskinan dan distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang searah sementara di perdesaan mempunyai hubungan yang terbalik.

Dari Gambar tersebut juga terlihat bahwa hubungan yang searah antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan selama periode pengamatan (1999-2008) baik di perkotaan maupun perdesaan hanya terjadi pada dua periode, yaitu periode 2005-2006 dan 2007-2008. Pada periode 2005-2006 kenaikan ketimpangan

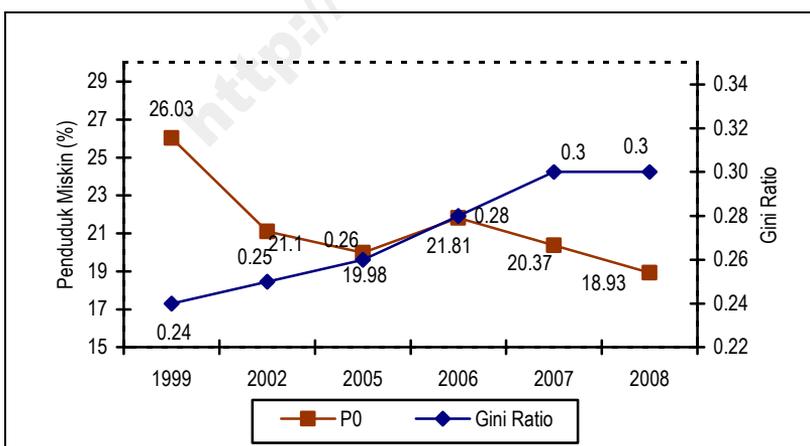
pendapatan diikuti oleh kenaikan insiden kemiskinan, sedangkan pada periode 2008-2008 penurunan ketimpangan pendapatan diikuti oleh penurunan insiden kemiskinan.

Gambar 4.11.
Persentase Penduduk Miskin dan Gini Ratio di Indonesia Perkotaan, 1999-2008



Sumber: Susenas Panel 2005, 2006, dan 2007

Gambar 4.12.
Persentase Penduduk Miskin dan Gini Ratio di Indonesia Perdesaan, 1999-2008



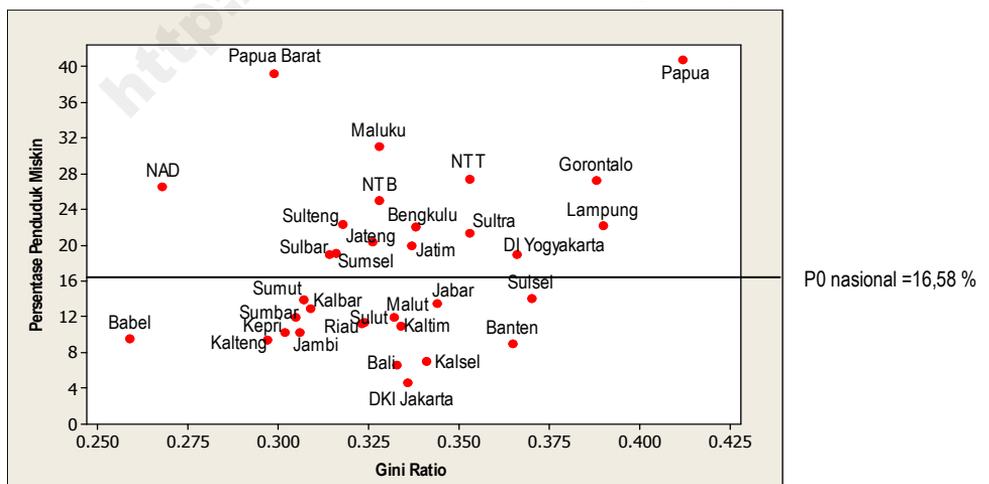
Sumber: Susenas Panel 2005, 2006, dan 2007

Gambar 4.13 menyajikan sebaran provinsi menurut besarnya gini rasio dan persentase penduduk miskin tahun 2007. Pada level

provinsi, nampak hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tidak mengikuti pola tertentu. Provinsi DKI Jakarta, Bali, Banten dan Kalimantan Selatan yang mempunyai persentase penduduk miskin di bawah 10 persen ternyata mempunyai ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi sementara itu provinsi NAD yang mempunyai persentase penduduk miskin cukup tinggi yaitu sekitar 26,6 persen namun ternyata mempunyai tingkat ketimpangan yang rendah. Demikian pula provinsi Papua Barat yang mempunyai persentase penduduk miskin tinggi (39,31 persen) namun mempunyai angka gini rasio yang relatif rendah. Namun demikian, beberapa provinsi terlihat konsisten dimana tingkat ketimpangan yang tinggi diikuti oleh tingkat kemiskinan yang tinggi pula. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Papua, Gorontalo dan Lampung.

Gambar 4.13.

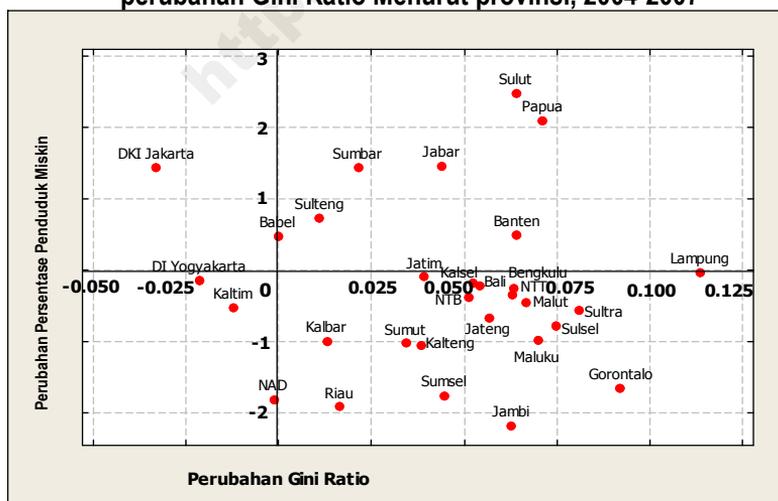
Persentase Penduduk Miskin dan Gini Ratio menurut provinsi, 2007



Sumber: Susenas 2007

Gambar 4.14 menyajikan hubungan antara perubahan persentase penduduk miskin (P_0) dan perubahan Gini Rasio periode 2004-2007 menurut provinsi. Dari Gambar tersebut terlihat bahwa hubungan yang terbalik antara perubahan persentase penduduk miskin dan perubahan Gini Rasio ditunjukkan oleh sebagian besar provinsi dimana kenaikan Gini Rasio diikuti oleh penurunan persentase penduduk miskin (kuadran IV) maupun penurunan Gini Rasio diikuti oleh kenaikan kemiskinan (DKI Jakarta). Sementara itu hanya beberapa provinsi saja yang mempunyai hubungan searah antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, yaitu diantaranya provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Papua (kenaikan ketimpangan diikuti oleh kenaikan kemiskinan) serta provinsi DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur (penurunan ketimpangan diikuti oleh penurunan kemiskinan).

Gambar 4.14.
Hubungan antara perubahan persentase penduduk Miskin (P_0) dan perubahan Gini Ratio Menurut provinsi, 2004-2007



Sumber: Susenas 2004 dan 2007

4.3.3. Hubungan Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Pada bagian ini diuraikan mengenai bagaimana hubungan yang terjadi antara tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Apakah terjadi hubungan timbal balik ataukah hubungan satu arah?. Metode yang digunakan untuk melihat hubungan timbal balik antara dua variabel adalah model kausalitas yang dikembangkan oleh Granger atau dikenal dengan nama *Granger Causality Test* (uji kausalitas Granger). Dengan menggunakan model ini dapat dilihat apakah dua variabel mempunyai hubungan yang searah ataukah hubungan dua arah (timbal balik). Data yang digunakan adalah Gini rasio dan *Headcount Index (P0)* periode 1999-2009.

Tabel 4.7. menyajikan hasil dari uji kausalitas Granger dengan menggunakan 3 lag waktu. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa pada periode tersebut tidak ada hubungan timbal balik yang terjadi antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan baik pada lag 1, lag 2 maupun lag 3. Baik pada lag 1, lag 2 maupun lag 3 tingkat kemiskinan tidak signifikan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Demikian sebaliknya, pada lag 2 dan lag 3 ketimpangan pendapatan tidak menyebabkan timbulnya kemiskinan. Namun pada lag 1 terlihat bahwa ketimpangan pendapatan (Gini rasio) mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan (P0) pada tingkat kesalahan (α) = 10 persen. Hal ini memberikan arti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada suatu tahun akan mempengaruhi tingkat kemiskinan pada satu tahun kemudian dengan tingkat

kesalahan (α) = 10 persen.

Tabel 4.7.
Hasil Uji Kausalitas Granger Dengan Lag 1 – 3

Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 1999 2009

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
P0 does not Granger Cause GR	10	2.15877	0.18521
GR does not Granger Cause P0 *)		4.68106	0.06725

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
P0 does not Granger Cause GR	9	0.82641	0.50071
GR does not Granger Cause P0		1.76815	0.28171

Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
P0 does not Granger Cause GR	8	0.25610	0.85739
GR does not Granger Cause P0		1.92539	0.47681

Catatan: *) Signifikan pada tingkat kesalahan 10 persen.

Keterangan: GR = Gini Rasio

P0 = Headcount Index (persentase penduduk miskin)

4.3.4. Distribusi Pendapatan Menurut Beberapa Karakteristik

Pada sub bab ini disajikan tingkat pemerataan pendapatan (distribusi pendapatan) penduduk miskin dan tidak miskin yang direpresentasikan oleh gini rasio dan rasio Q_5/Q_1 berdasarkan berbagai karakteristik menurut daerah, status pekerjaan, dan lapangan usaha (sektor) periode 2005-2007.

Tabel 4.8 menyajikan gini rasio menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Seyogyanya, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk angkatan kerja di perkotaan lebih besar dibanding perdesaan. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 4.8, dimana gini rasio penduduk angkatan kerja perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan baik pada tahun 2005, 2006, ataupun 2007 atau dengan kata lain bahwa rata-rata pengeluaran perkapita penduduk angkatan kerja di perdesaan lebih merata dibandingkan daerah perkotaan.

Selama periode 2005-2007 gini rasio mempunyai tren yang cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk angkatan kerja yang semakin memburuk. Sedangkan bila dilihat menurut daerah perkotaan maupun perdesaan, terlihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk angkatan kerja berfluktuasi. (Gambar 4.15)

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk angkatan kerja miskin tercatat lebih rendah dibanding yang statusnya tidak miskin. Hal tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan seperti yang terlihat pada Tabel 4.8. Bila melihat trennya selama periode 2005-2007, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk angkatan kerja baik yang miskin maupun tidak miskin nampak berfluktuasi.

Tren gini rasio penduduk angkatan kerja di perkotaan yang statusnya miskin periode 2005-2007 cenderung menurun, sedangkan yang statusnya tidak miskin berfluktuasi. Di daerah perdesaan, tren perubahan gini rasio penduduk angkatan kerja miskin terlihat berfluktuasi, begitu pula dengan yang statusnya tidak miskin.

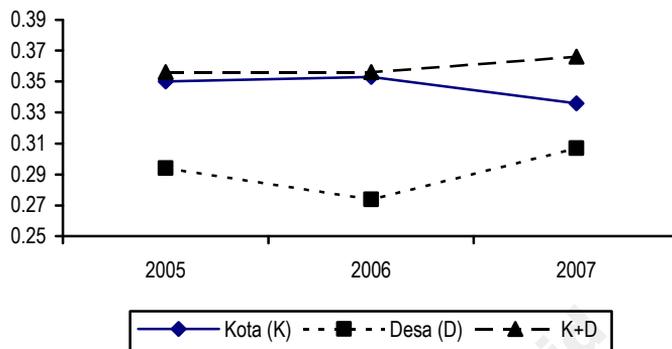
Tabel 4.8.
Gini Rasio Menurut Daerah dan Status Miskin Tahun 2005-2007 *)

Daerah/Status Miskin	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota			
a. Miskin	0.118	0.096	0.039
b. Tidak Miskin	0.320	0.323	0.315
c. Total	0.350	0.353	0.336
Desa			
a. Miskin	0.093	0.096	0.088
b. Tidak Miskin	0.260	0.235	0.271
c. Total	0.294	0.274	0.307
Kota + Desa			
a. Miskin	0.135	0.126	0.181
b. Tidak Miskin	0.326	0.325	0.340
c. Total	0.356	0.356	0.366

Sumber: Data Susenas Modul 2005-2007

Catatan: *)Gini rasio penduduk angkatan kerja

Gambar 4.15.
Gini Rasio Menurut Daerah Tahun 2005-2007 *)



Sumber: Data Susenas KOR dan Modul Panel 2005-2007

Catatan: *)Gini rasio penduduk angkatan kerja

Sama halnya dengan gini rasio, rasio Q_5/Q_1 penduduk angkatan kerja di perkotaan juga tercatat lebih besar dibanding perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah perkotaan lebih timpang dibandingkan dengan di perdesaan. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.9. Besarnya rasio Q_5/Q_1 penduduk angkatan kerja di perkotaan dibanding di perdesaan memberikan arti bahwa rata-rata pengeluaran perkapita penduduk angkatan kerja yang kaya (Q_5) dan miskin (Q_1) jaraknya lebih lebar di perkotaan dibanding perdesaan. Hal ini terjadi baik pada tahun 2005, 2006, ataupun 2007.

Bila melihat tren rasio Q_5/Q_1 selama periode 2005-2007 yang secara total cenderung meningkat mengindikasikan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk angkatan kerja yang kaya (Q_5) dan miskin (Q_1) jaraknya semakin lebar. Sedangkan bila dirinci menurut

daerah perkotaan dan perdesaan, tren tersebut terlihat berfluktuasi (Gambar 4.16). Bila dilihat menurut status miskinnya masih pada Tabel 4.9, terlihat tren rasio Q_5/Q_1 penduduk angkatan kerja periode 2005-2007, baik yang miskin maupun tidak miskin berfluktuasi. Hal tersebut terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan.

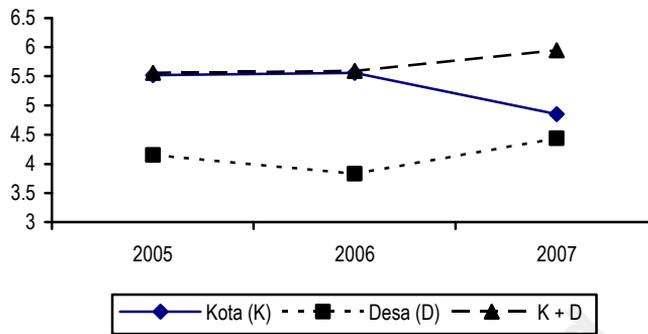
Tabel 4.9.
Rasio Q_5/Q_1 Menurut Status Daerah dan Status Miskin
Tahun 2005-2007*)

Daerah/Status Miskin	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota			
a. Miskin	1.943	0.050	1.207
b. Tidak Miskin	4.417	4.481	4.298
c. Total	5.519	5.555	4.853
Desa			
a. Miskin	1.626	1.636	1.547
b. Tidak Miskin	3.316	2.993	3.505
c. Total	4.154	3.835	4.437
Kota + Desa			
a. Miskin	2.041	1.904	2.364
b. Tidak Miskin	4.549	4.518	5.037
c. Total	5.558	5.591	5.946

Sumber: Data Susenas Panel 2005-2007

Catatan: *)Rasio Q_5/Q_1 penduduk angkatan kerja

Gambar 4.16.
Rasio Q5/Q1 Menurut Daerah Tahun 2005-2007 *)



Sumber: Data Susenas Panel 2005-2007

Catatan: *)Rasio Q_5/Q_1 penduduk angkatan kerja

Gini rasio juga dapat dilihat menurut status pekerjaan (bekerja dan menganggur) dan status miskinnya. Tabel 4.10 menyajikan hal tersebut. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk angkatan kerja yang bekerja lebih besar dibandingkan yang menganggur. Hal ini diindikasikan dengan angka gini rasio dimana gini rasio penduduk angkatan kerja yang bekerja lebih besar dibandingkan yang menganggur baik pada tahun 2005, 2006, ataupun 2007.

Bila melihat tren gini rasio menurut status pekerjaan dari Gambar 4.17 dapat dilihat bahwa penduduk angkatan kerja yang statusnya bekerja mengalami peningkatan dalam ketimpangan pendapatan selama periode 2005-2007. Kondisi yang sama terjadi untuk angkatan kerja yang statusnya menganggur dimana terlihat adanya peningkatan dalam tingkat ketimpangan pendapatan selama

periode 2005-2007.

Lebih jauh, masih pada Tabel 4.10 dapat dibandingkan antara angkatan kerja yang bekerja dengan status miskin beserta angkatan kerja yang bekerja dengan status tidak miskin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ternyata yang berstatus miskin mempunyai pendapatan yang lebih merata/tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak miskin. Hal tersebut juga berlaku untuk angkatan kerja yang menganggur.

Hal lain yang dapat dilihat pada tabel tersebut adalah disparitas tingkat ketimpangan pendapatan antara yang miskin dan tidak miskin untuk masing-masing penduduk bekerja dan menganggur. Untuk penduduk yang bekerja, perbedaan nilai indeks gini antara yang miskin dan yang tidak miskin cukup lebar dibandingkan dengan penduduk yang menganggur. Hal ini memberikan arti bahwa untuk penduduk bekerja perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan antara yang miskin dan tidak miskin lebih tinggi dibandingkan dengan yang menganggur. Untuk yang bekerja, gini rasio (indeks gini) kelompok miskin berkisar antara 0,124 – 0,181 dan yang tidak miskin berkisar antara 0,330 – 0,342 selama periode 2005-2007. Sementara untuk yang menganggur, gini rasio (indeks gini) kelompok miskin berkisar antara 0,130 – 0,172 dan yang tidak miskin berkisar antara 0,282 – 0,315 pada periode yang sama.

Bila melihat tren selama periode 2005-2007, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk angkatan kerja yang statusnya bekerja dan miskin nampak berfluktuasi, begitu pula dengan yang statusnya tidak miskin memperlihatkan hal yang sama. Pola yang

sama ditunjukkan pula untuk penduduk angkatan kerja yang statusnya menganggur dan miskin, dimana tingkat ketimpangan pendapatan terlihat mengalami tren yang berfluktuasi. Dilain pihak, untuk yang statusnya tidak miskin tingkat ketimpangan pendapatannya cenderung meningkat.

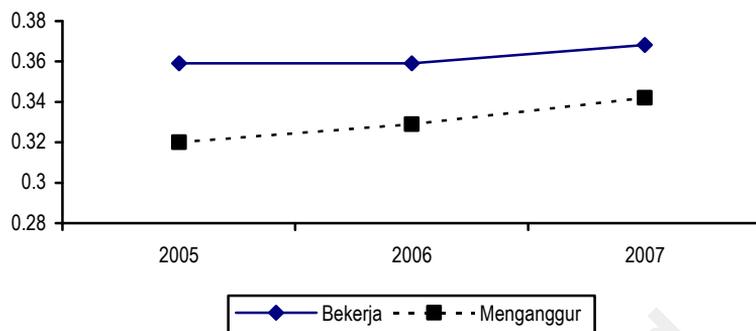
Tabel 4.10.
Gini Rasio Menurut Status Pekerjaan dan Status Miskin
Tahun 2005-2007*)

Status Pekerjaan/ Miskin	2005	2006	2007
Bekerja			
a. Miskin	0.133	0.124	0.181
b. Tidak Miskin	0.330	0.328	0.342
c. Total	0.359	0.359	0.368
Menganggur			
a. Miskin	0.150	0.130	0.172
b. Tidak Miskin	0.282	0.294	0.315
c. Total	0.320	0.329	0.342
Total			
a. Miskin	0.135	0.126	0.181
b. Tidak Miskin	0.326	0.325	0.340
c. Total	0.356	0.356	0.366

Sumber: Data Susenas Panel 2005-2007

Catatan: *)Gini rasio penduduk angkatan kerja

Gambar 4.17.
Gini Rasio Menurut Status Pekerjaan Tahun 2005-2007*)



Sumber: Data Susenas Panel 2005-2007

Catatan: *)Gini rasio penduduk angkatan kerja

Sama halnya dengan gini rasio, ukuran tingkat ketimpangan yang lain yaitu rasio Q_5/Q_1 yang dirinci menurut status pekerjaan (bekerja dan menganggur) menunjukkan bahwa penduduk angkatan kerja yang bekerja mempunyai rasio Q_5/Q_1 yang lebih besar dibanding yang menganggur. Hal ini memberikan arti bahwa penduduk bekerja mempunyai tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menganggur. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.11. Kondisi ini terjadi baik pada tahun 2005, 2006, ataupun 2007.

Bila melihat tren rasio Q_5/Q_1 selama periode 2005-2007 menurut status pekerjaan seperti yang disajikan pada Gambar 4.18 terlihat bahwa penduduk angkatan kerja yang statusnya bekerja mempunyai rasio Q_5/Q_1 yang cenderung meningkat. Begitu pula pada penduduk angkatan kerja yang statusnya menganggur, tren

rasio Q_5/Q_1 nya juga cenderung meningkat.

Masih pada Tabel 4.11, terlihat bahwa rasio Q_5/Q_1 penduduk angkatan kerja yang bekerja dan statusnya miskin lebih kecil dibanding yang statusnya tidak miskin, begitu pula dengan yang menganggur. Hal ini memberikan arti bahwa baik untuk angkatan kerja yang bekerja maupun yang menganggur, ternyata yang statusnya miskin mempunyai distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan yang tidak miskin. Hal ini terjadi baik pada tahun 2005, 2006 maupun 2007.

Tabel 4.11.
Rasio Q_5/Q_1 Menurut Status Pekerjaan dan Status Miskin
Tahun 2005-2007*)

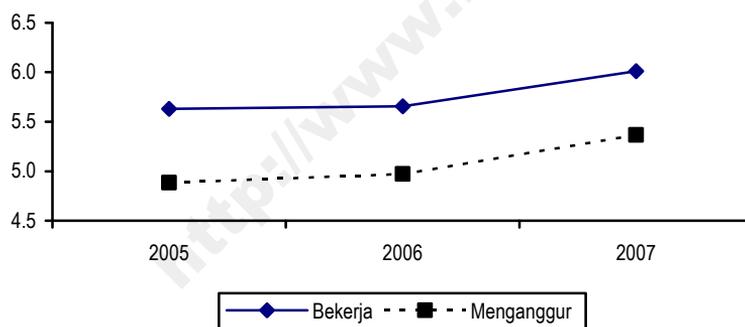
Status Pekerjaan/ Miskin	2005	2006	2007
Bekerja			
a. Miskin	2.006	1.908	2.366
b. Tidak Miskin	4.624	4.569	5.079
c. Total	5.630	5.655	6.009
Menganggur			
a. Miskin	2.233	1.955	2.304
b. Tidak Miskin	3.830	3.964	4.584
c. Total	4.886	4.974	5.367
Total			
a. Miskin	2.041	1.904	2.364
b. Tidak Miskin	4.549	4.518	5.037
c. Total	5.558	5.591	5.946

Sumber: Data Susenas KOR Panel 2005-2007

Catatan: *)Rasio Q_5/Q_1 penduduk angkatan kerja

Selain perbandingan antar status pekerjaan dan status kemiskinan, dari tabel tersebut dapat dilihat pula perkembangan rasio Q_5/Q_1 selama periode 2005-2007 untuk angkatan kerja baik yang miskin maupun tidak miskin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rasio Q_5/Q_1 penduduk angkatan kerja yang bekerja baik yang statusnya miskin maupun yang tidak miskin mempunyai tren yang berfluktuasi selama periode tersebut. Hal tersebut juga terjadi untuk angkatan kerja yang menganggur dan statusnya miskin. Namun berbeda dengan yang statusnya tidak miskin dimana trennya cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 4.18.
Rasio Q_5/Q_1 Menurut Status Pekerjaan Tahun 2005-2007*)



Sumber: Data Susenas Panel 2005-2007

Catatan: *)Rasio Q_5/Q_1 penduduk angkatan kerja

Gini rasio juga dapat dilihat menurut lapangan usaha (sektor) yang meliputi sektor pertanian, industri, dan lainnya (Tabel 4.12). Secara umum, tingkat ketimpangan pendapatan angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian tercatat lebih rendah dibandingkan

dengan yang bekerja di sektor industri dan sektor lainnya baik pada tahun 2005, 2006, ataupun 2007. Hal ini dapat memberikan arti bahwa rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang bekerja di sektor pertanian lebih merata dibanding yang di sektor industri dan sektor lainnya. Namun hal tersebut berbeda jika dirinci menurut status kemiskinannya. Untuk yang statusnya miskin, hal tersebut hanya terjadi pada tahun 2005 sedangkan pada tahun 2006 dan 2007, yang paling merata adalah pada sektor lainnya.

Perkembangan gini rasio periode 2005-2007 menurut lapangan usaha (sektor) dapat dilihat pada Gambar 4.19. dari tabel tersebut terlihat bahwa tren tingkat ketimpangan pendapatan angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian terlihat berfluktuasi. Berbeda dengan di pertanian untuk sektor Industri tren tingkat ketimpangan pendapatannya cenderung meningkat. Sementara untuk sektor lainnya tingkat ketimpangan pendapatan penduduknya berfluktuasi.

Sebagaimana halnya jika dilihat berdasarkan karakteristik lainnya, maka berdasarkan lapangan usaha pekerjaannya juga terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk miskin lebih kecil dibanding penduduk tidak miskin baik itu penduduk yang bekerja di sektor pertanian, industri maupun sektor lainnya. Hal ini terjadi baik pada tahun 2005, 2006 maupun 2007.

Jika dilihat dari angka gini rasio, tingkat ketimpangan pendapatan antara yang miskin dan tidak miskin jauh berbeda di sektor selain pertanian dan industri. Di sektor selain pertanian dan industri (sektor lainnya), gini rasio yang miskin berkisar antara

0,114-0,140 selama periode 2005-2007 dan yang tidak miskin berkisar antara 0,337-0,341 pada periode yang sama. Sementara itu di sektor pertanian, meskipun yang tidak miskin tercatat lebih timpang dibandingkan yang miskin namun perbedaan tingkat ketimpangan antar yang miskin dan tidak miskin tersebut tidak terlalu lebar. Tercatat di sektor pertanian gini rasio untuk yang miskin berkisar antara 0,116 – 0,151 dan yang tidak miskin berkisar antara 0,216 – 0,260 pada periode 2005-2007.

Tabel 4.12.

Gini Rasio Menurut Sektor dan Status Miskin Tahun 2005-2007*)

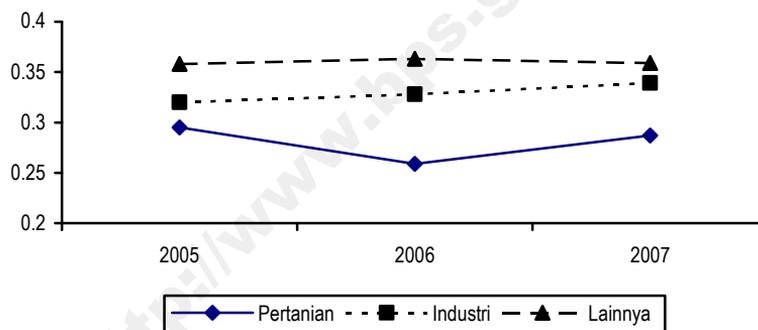
Daerah/Status Miskin	2005	2006	2007
Pertanian			
a. Miskin	0.120	0.116	0.151
b. Tidak Miskin	0.260	0.216	0.251
c. Total	0.295	0.259	0.287
Industri			
a. Miskin	0.131	0.120	0.163
b. Tidak Miskin	0.293	0.299	0.318
c. Total	0.320	0.328	0.339
Lainnya			
a. Miskin	0.127	0.114	0.140
b. Tidak Miskin	0.337	0.340	0.341
c. Total	0.358	0.363	0.359
Total			
a. Miskin	0.133	0.124	0.181
b. Tidak Miskin	0.330	0.328	0.342
c. Total	0.359	0.359	0.368

Sumber: Data Susenas Panel 2005-2007

Catatan: *)Gini rasio penduduk angkatan kerja

Gambar 4.19 menyajikan tren dari gini rasio menurut lapangan pekerjaan selama periode 2005-2007. Dari Gambar tersebut terlihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian dan sektor lainnya (selain pertanian dan industri) terlihat berfluktuasi, sementara untuk sektor industri mengalami peningkatan. Sementara apabila dirinci menurut status kemiskinannya, pada umumnya angka gini rasio mempunyai tren yang cenderung berfluktuasi pada periode tersebut.

Gambar 4.19.
Gini Rasio Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2007*)



Sumber: Data Susenas Panel 2005-2007

Catatan: *)Gini rasio penduduk angkatan kerja

Tabel 4.13 menyajikan ukuran ketimpangan yang lain yaitu rasio Q_5/Q_1 menurut lapangan usaha (sektor) dan status kemiskinan pada periode 2005-2007. sebagaimana halnya dengan gini rasio, rasio Q_5/Q_1 pada periode tersebut menunjukkan bahwa angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian mempunyai distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan sektor lainnya.

Untuk sektor pertanian, rasio Q5/Q1 pada periode 2005-2007 secara total (miskin dan tidak miskin) berkisar antara 3,590 – 4,157 sementara untuk sektor industri berkisar antara 4,814 - 5,130. Yang paling tinggi tingkat ketimpangannya adalah pada sektor selain pertanian dan industri yaitu berkisar antara 5,652 – 5,848.

Tabel 4.13.

Rasio Q₅/Q₁ Menurut Sektor dan Status Miskin Tahun 2005-2007*)

Daerah/Status Miskin	2005	2006	2007
Pertanian			
a. Miskin	1.867	1.800	2.132
b. Tidak Miskin	3.274	2.754	3.233
c. Total	4.157	3.590	4.086
Industri			
a. Miskin	1.991	1.859	2.218
b. Tidak Miskin	4.043	4.053	4.552
c. Total	4.814	4.918	5.130
Lainnya			
a. Miskin	1.962	1.772	2.157
b. Tidak Miskin	4.877	4.937	5.046
c. Total	5.658	5.858	5.652
Total			
a. Miskin	2.006	1.908	2.366
b. Tidak Miskin	4.624	4.569	5.079
c. Total	5.630	5.655	6.009

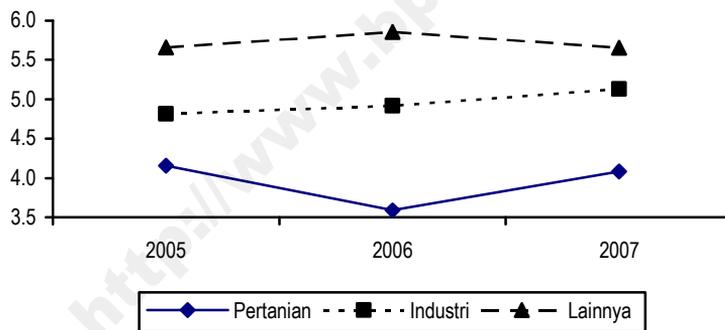
Sumber: Data SusenasPanel 2005-2007

Catatan: *)Rasio Q₅/Q₁ penduduk angkatan kerja

Sejalan dengan gini rasio, rasio Q5/Q1 periode 2005-2007 juga menunjukkan bahwa perbedaan ketimpangan pendapatan antara yang miskin dan tidak miskin yang paling rendah terjadi di sektor pertanian. Di sektor tersebut, rasio Q5/Q1 untuk yang miskin berkisar

antara 1,800 – 2,132 dan yang tidak miskin berkisar antara 2,754 – 3,274. Berbeda dengan sektor pertanian, di sektor industri rasio Q5/Q1 yang miskin berkisar antara 1,859 – 2,218 dan yang tidak miskin berkisar antara 4,814 – 5,130. Sementara itu, di sektor lainnya rasio Q5/Q1 yang miskin berkisar antara 1,772 – 2,157 dan yang tidak miskin berkisar antara 4,877 – 5,046. Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa tingkat ketimpangan bagi pekerja-pekerja yang miskin relatif sama dimanapun mereka bekerja, sementara untuk yang tidak miskin berbeda antara sektor usaha.

Gambar 4.20.
Rasio Q_5/Q_1 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2007*)



Sumber: Data Susenas Panel 2005-2007

Catatan: *)Rasio Q_5/Q_1 penduduk angkatan

4.4. Hubungan antara Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan

Pada sub bab ini dibahas hubungan antara kemiskinan, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan dengan menggunakan model persamaan regresi. Karena keterbatasan series data, maka

model yang akan digunakan dalam analisis disini adalah model regresi data panel. Model regresi yang dipakai dalam laporan ini mengacu kepada model yang dikembangkan oleh Xin Meng dkk pada tahun 2005 dalam penelitiannya yang berjudul “*Poverty, Inequality, and Growth in Urban China, 1986-2000*”. Dalam penelitiannya, Xin Meng mengembangkan suatu model kemiskinan dimana dalam modelnya tersebut kemiskinan merupakan fungsi dari pendapatan, tingkat ketimpangan, *saving rate* (tingkat tabungan), tingkat kenaikan harga, persentase pengeluaran untuk pendidikan, perumahan dan kesehatan terhadap total pengeluaran serta fungsi dari suatu variabel kontrol dalam hal ini pengangguran.

Dengan mengacu kepada model Xin Meng dan adanya keterbatasan data maka dalam laporan ini model persamaan regresi yang dibentuk yaitu dengan menggunakan variabel tidak bebas (*dependent variable*) persentase penduduk miskin (*head count index*), sedangkan variabel bebasnya (*independent variable*) adalah PDRB harga konstan, gini rasio, tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks harga konsumen makanan, dan rasio pengeluaran non makanan (kesehatan, pendidikan, dan perumahan). Data yang digunakan adalah data provinsi (*cross section*) dari tahun 2002-2007. Model selengkapnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Log } PO_{it} = & \beta_0 + \beta_1 * \text{Log}(PDRBHK_{it}) + \beta_2 * \text{Log}(Gini_{it}) + \\ & \beta_3 * \text{Log}(TPT_{it}) + \beta_4 * \text{Log}(IHKM_{it}) + \beta_5 * \text{Log}(RNM_{it}) + e \end{aligned}$$

Dimana:

- P0 = % penduduk miskin (Head Count Index)
PDRBHK = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan
Gini = Gini rasio
TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
IHKM = Indeks Harga Konsumen kelompok Makanan
RNM = Rasio Konsumsi Non Makanan terhadap Total Konsumsi
i = Provinsi ke-i
t = Tahun pengamatan (2002-2007)

Dalam model regresi data panel dikenal tiga metode, yaitu metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Dalam metode *common effect* hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua objek dan pada keseluruhan waktu. Metode ini mempunyai kelemahan yaitu adanya ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya karena sebetulnya kondisi setiap objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode *fixed effect* dimana dalam metode ini sudah ditunjukkan perbedaan konstan antar objek. Metode *fixed effect* menunjukkan bahwa dalam satu objek memiliki suatu konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Sementara itu metode *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan metode *fixed effect* yang menggunakan variabel semu yang dapat menyebabkan model mengalami

ketidakpastian. Sementara untuk melihat mana yang terbaik dari ketiga metode tersebut digunakan uji *Lagrange Multiplier (LM)* dan uji *Haussman*.

Tabel 4.14.
Hasil dari Model Persamaan Regresi Data Panel

Independent Variabel	Log(Poverty)		
	Dengan Gini Dan TPT.	Tanpa TPT.	Tanpa Gini
(1)	(2)	(3)	(4)
Constant	4,730*** (4,761)	4,958*** (4,962)	4,370*** (4,373)
Log(PDRB harga konstan)	-0,103 (-1,476)	-0,109 (-1,555)	-0,078 (-1,113)
Log(Gini)	0,003 (0,044)	0,009 (0,149)	
Log(Unemployment)	0,071** (2,215)		0,073** (2,339)
Log(IHK makanan)	0,012 (0,298)	0,002 (0,041)	0,004 (0,092)
Log(Rasio Non Makanan)	-0,171*** (-3,026)	-0,146** (-2,588)	-0,169*** (-3,217)
R-Squared	0,9894	0,9890	0,9895
Adjusted R-Squared	0,9891	0,9887	0,9892

* Indicate the significant level at 10%.

** Idem., 5%.

*** Idem., 1%.

Berdasarkan uji *LM* dan uji *Haussman* yang telah dilakukan maka metode yang paling tepat digunakan pada model diatas adalah metode *random effect*. Estimasi model dibuat dengan menggunakan tiga alternatif. Alternatif pertama adalah jika kedua variabel

ketimpangan pengeluaran (gini rasio) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dimasukkan dalam model. Alternatif kedua dan ketiga adalah ketika tingkat pengangguran berkorelasi kuat dengan ketimpangan pengeluaran maka estimasi mengeluarkan variabel tingkat pengangguran atau gini rasio. Model menggunakan regresi *doublelog* sehingga setiap koefisien menunjukkan elastisitasnya terhadap perubahan tingkat kemiskinan (*ceteris paribus*). Tabel 4.14 menyajikan hasil estimasi dari ketiga alternatif tersebut.

a. Regresi Dengan Variabel Independen Gini Rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Dari hasil estimasi regresi yang disajikan pada Tabel 4.14 kolom 2, terlihat ada dua variabel tidak bebas (*independent variable*) yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT yang signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$ dan persentase pengeluaran kesehatan, pendidikan dan perumahan yang signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara parsial terdapat beberapa variabel tidak bebas yang tidak signifikan namun secara bersama-sama semua variabel tidak bebas yang digunakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan variabel bebasnya (tingkat kemiskinan di Indonesia) dengan R^2 yang disesuaikan (*adjusted R-squared*) sebesar 98,9 persen.

Dari Tabel 4.14 terlihat pula bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan persentase pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan dan perumahan (RNM) mempunyai tanda negatif yang

mengandung arti bahwa jika variabel-variabel tersebut menurun maka tingkat kemiskinan akan meningkat, sebaliknya jika variabel-variabel tersebut meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun dengan asumsi faktor lain dianggap konstan/tetap (*ceteris paribus*). PDRB mempunyai koefisien regresi sebesar -0,103 yang memberikan arti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,103 persen (*ceteris paribus*). Sementara untuk RNM mempunyai koefisien regresi sebesar -0,171 yang memberikan arti bahwa setiap kenaikan RNM sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,171 persen (*ceteris paribus*).

Sementara itu tiga variabel tidak bebas lainnya yaitu gini rasio, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indeks harga konsumen kelompok makanan (IHKM) menunjukkan arah yang positif. Hal ini berarti bahwa jika variabel-variabel tersebut menunjukkan penurunan maka tingkat kemiskinan akan menurun pula dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Hal sebaliknya dapat pula terjadi jika variabel-variabel tersebut meningkat maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Indikasi ini memperkuat dugaan bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan disamping karena adanya penurunan daya beli yang diakibatkan oleh adanya inflasi.

b. Regresi Tanpa Menggunakan Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Hasil estimasi regresi tanpa variabel TPT disajikan pada Tabel

4.14 kolom 3. Estimasi yang dihasilkan pada model ini menunjukkan hanya ada satu variabel yang signifikan secara parsial pada $\alpha = 1\%$, yaitu variabel persentase/rasio pengeluaran pendidikan, kesehatan dan perumahan terhadap total pengeluaran (RNM) sementara tiga variabel lainnya (PDRB, Gini rasio dan IHK kelompok makanan) tidak signifikan secara parsial dalam mempengaruhi variabel bebas (tingkat kemiskinan). Namun demikian, oleh karena minimal ada satu variabel tidak bebas yang signifikan maka secara bersama-sama variabel-variabel tidak bebas tersebut akan signifikan pengaruhnya terhadap variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*) pada model ini adalah sebesar 0,989 artinya model tersebut mampu menjelaskan variasi persentase penduduk miskin sebesar 98,90 persen.

Sebagaimana halnya pada model pertama, pada model kedua ini arah dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan persentase pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan dan perumahan (RNM) mempunyai arah negatif yang mengandung arti bahwa jika variabel-variabel tersebut menurun maka akan meningkatkan kemiskinan demikian sebaliknya (*ceteris paribus*). PDRB mempunyai koefisien regresi -0,109 dan RNM mempunyai koefisien regresi -0,146, hal ini berarti jika PDRB naik sebesar 1 persen maka persentase penduduk miskin akan turun sebesar 0,109 persen. Dilain pihak, jika RNM menurun sebesar 1 persen maka persentase penduduk miskin akan turun sebesar 0,146 persen.

Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel gini rasio dan indeks harga konsumen kelompok makanan (IHKM) mempunyai arah

yang positif yaitu masing-masing sebesar 0,009 dan 0,002. Hal ini memberikan arti bahwa jika kedua variabel ini naik maka akan meningkatkan angka kemiskina.

c. Regresi Tanpa Menggunakan Variabel Gini Rasio.

Hasil estimasi regresi tanpa variabel gini rasio disajikan pada Tabel 4.14 kolom 4. Estimasi yang dihasilkan pada model ini menunjukkan hanya ada dua variabel yang signifikan secara parsial yaitu TPT (pada $\alpha = 1\%$) dan RNM (pada $\alpha = 5\%$), sementara variabel lainnya yaitu PDRB dan IHKM tidak signifikan secara parsial dalam mempengaruhi variabel bebas (tingkat kemiskinan). Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*) pada model ini adalah sebesar 0,989 artinya model tersebut mampu menjelaskan variasi persentase penduduk miskin sebesar 98,90 persen.

Sebagaimana halnya pada model pertama dan kedua, pada model ketiga inipun arah dari dua variabel yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan persentase pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan dan perumahan (RNM) mempunyai arah negatif yang mengandung arti bahwa jika variabel-variabel tersebut menurun maka akan meningkatkan kemiskinan demikian pula sebaliknya (*ceteris paribus*). Pada model ketiga ini, PDRB mempunyai koefisien regresi -0,078 dan RNM mempunyai koefisien regresi -0,169. Sementara itu, dua variabel lainnya yaitu TPT dan IHKM mempunyai arah yang positif yaitu masing-masing sebesar 0,073 dan 0,004. Hal ini memberikan arti bahwa jika kedua variabel ini naik maka akan meningkatkan angka kemiskinan.

BAB 5

PENUTUP

<http://www.pps.id>

Kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di berbagai bidang merupakan tiga masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan berarti apabila diikuti oleh pemerataan atas hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro menunjukkan performa yang baik, namun di sisi lain realitas kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan masih menyelimuti sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan memperhatikan struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia, banyak pengamat ekonomi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berkualitas sehingga pertumbuhan ekonomi lepas kaitan dan tidak membawa dampak yang positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.

Hubungan kausalitas antara kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta tentunya tidak terlepas dari kontribusi pertumbuhan ekonomi dapat diestimasi dengan perilaku siklikal (*cyclical behaviour*) keempat indikator tersebut dalam suatu periode tertentu. Uji statistik untuk mendeteksi hal tersebut salah satunya adalah uji kausalitas Granger. Hasil dari uji kausalitas dengan menggunakan 3 (tiga) lag waktu adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi lepas kaitan dengan masalah kemiskinan baik untuk lag 1, lag 2, maupun lag 3.

- Pada lag 1, ketimpangan pendapatan akan menyebabkan kemiskinan pada tingkat kesalahan (α) = 10 persen, namun kemiskinan tidak menyebabkan ketimpangan pendapatan.
- Pada lag 1, pengangguran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat kesalahan (α) = 5 persen namun tidak terjadi sebaliknya.
- Pada lag 1, ketimpangan pendapatan akan menyebabkan pengangguran pada tingkat kesalahan (α) = 5 persen, demikian pula pengangguran akan menyebabkan ketimpangan pendapatan pada (α) = 10 persen. Dengan demikian pada lag 1 terjadi hubungan kausalitas antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan.
- Pada lag 2, pengangguran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat kesalahan (α) = 10 persen namun tidak terjadi sebaliknya.
- Pada lag 2, ketimpangan pendapatan akan mempengaruhi pengangguran pada tingkat kesalahan (α) = 10 persen namun tidak terjadi sebaliknya.
- Pada lag 3, kemiskinan akan menyebabkan pengangguran pada (α) = 10 persen namun tidak terjadi sebaliknya.
- Pada lag 3, pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan pengangguran pada (α) = 10 persen namun tidak terjadi sebaliknya.

Banyak literatur yang menyatakan ada hubungan yang erat antara pengangguran dan kemiskinan, tetapi untuk membuktikannya

secara empiris tidaklah mudah. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara data kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah masalah sumber data dan waktu pengumpulannya. Data kemiskinan dihitung dari hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang datanya dikumpulkan setiap bulan Maret, sementara data pengangguran diperoleh dari hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang pengumpulan datanya dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus. Faktor lainnya adalah masalah dalam pengukuran kemiskinan yang dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebuah rumah tangga. Dengan demikian seseorang yang menganggur tidak otomatis menjadi miskin apabila dalam rumah tangga tersebut ada anggota rumah tangga lain yang bekerja dengan penghasilan yang cukup tinggi sehingga rata-rata pendapatan/pengeluaran per kapita rumah tangga tersebut berada di atas garis kemiskinan.

Meski demikian, kaitan antara kemiskinan dan ketenagakerjaan masih bisa dideteksi dengan menggunakan data Susenas. Berdasarkan data Susenas panel, pada tahun 2005 persentase kemiskinan (*headcount index*) untuk penduduk (angkatan kerja) yang bekerja tercatat sebesar 14,93 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan yang menganggur yang sebesar 16,97 persen. Demikian juga untuk tahun 2006 dan 2007 *head count index* yang bekerja selalu lebih rendah dibandingkan dengan yang menganggur. Hal ini memberikan suatu indikasi bahwa peluang penganggur untuk jatuh miskin lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja.

Sejalan dengan itu, jika dibandingkan antara setengah penganggur (bekerja < 35 jam per minggu) dan bekerja dengan jam kerja normal (\geq 35 jam per minggu) pada periode 2005-2007, persentase kemiskinan (*head count index*) setengah penganggur selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja dengan jam kerja normal. Pada tahun 2005 tercatat *head count index* untuk setengah pengangguran sebesar 17,41 persen dan untuk pekerja dengan jam kerja normal sekitar 13,63 persen. Sementara untuk tahun 2006 adalah 21,72 persen banding 14,32 persen, dan untuk tahun 2007 adalah 19,09 persen banding 14,79 persen.

Jika dilihat dari lapangan usahanya, tercatat sektor pertanian mempunyai *headcount index* paling tinggi dibandingkan dengan sektor di luar pertanian (industri pengolahan dan lainnya). Hal ini memberikan suatu indikasi bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menjadi miskin dibandingkan dengan sektor lainnya di luar pertanian. Pada tahun 2005, 2006 dan 2007 *headcount index* penduduk yang bekerja di sektor pertanian berturut-turut sebesar 22,47 persen, 25,41 persen dan 23,28 persen. Sementara yang bekerja di sektor industri pengolahan berturut-turut sebesar 12,21 persen, 13,19 persen dan 16,48 persen. Untuk sektor lainnya berturut-turut sebesar 9,00 persen, 10,60 persen dan 10,53 persen.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya (formal atau informal), terlihat bahwa pekerja informal selalu mempunyai *headcount index* lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja formal. Pada tahun 2005 tercatat *headcount index* pekerja informal

dibanding pekerja formal adalah 18,41 persen banding 8,84 persen. Untuk tahun 2006 yaitu 21,08 persen banding 9,25 persen dan untuk tahun 2007 adalah 19,66 persen banding 10,10 persen. Dari beberapa bukti empiris yang ada, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kemiskinan terkait dengan ketenagakerjaan yaitu: lapangan usaha dimana dia bekerja, status usaha(formal/informal) dan jam kerja perminggu.

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa ada hubungan yang sistematis antara tingkat distribusi pendapatan dan kemiskinan meskipun hubungan tersebut tidak berlaku umum dan berbeda antar negara/wilayah tergantung kepada karakteristik yang dimiliki masing-masing negara/wilayah. Untuk kasus Indonesia hubungan yang searah antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan baru terjadi pada periode 2007-2009 dimana pada periode tersebut terjadi penurunan indeks gini (gini rasio) yang diikuti oleh penurunan insiden kemiskinan. Dilain pihak, analisis kausalitas dengan menggunakan model kausalitas Granger menghasilkan kesimpulan bahwa pada lag 1 ketimpangan pendapatan (Gini rasio) mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan (P_0) pada tingkat kesalahan (α) = 10 persen.

Temuan lain menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2005, 2006 dan 2007 lebih merata dibandingkan dengan penduduk tidak miskin baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka gini rasio dan rasio Q_5/Q_1 penduduk miskin yang lebih kecil dibanding penduduk tidak miskin.

Hal yang menarik terlihat pada distribusi pengeluaran penduduk apabila dibedakan antara bekerja dan tidak bekerja (menganggur), dimana terlihat bahwa pada tahun 2007 penduduk yang tidak bekerja (menganggur) mempunyai distribusi pengeluaran yang lebih merata dibandingkan dengan penduduk yang bekerja baik untuk yang berstatus miskin maupun tidak miskin. Namun pada tahun 2005 dan 2006 utamanya pada kelompok miskin terlihat penduduk bekerja lebih merata dibandingkan dengan yang tidak bekerja (menganggur).

Jika dilihat menurut sektor, untuk tahun 2005 terlihat penduduk miskin di sektor pertanian relatif mempunyai distribusi pengeluaran yang lebih merata dibandingkan dengan kedua sektor lainnya. Hal yang berbeda terjadi pada tahun 2006 dan 2007 dimana distribusi pengeluaran penduduk miskin di sektor lainnya menunjukkan angka yang lebih merata dibandingkan dengan sektor pertanian dan industri pengolahan.

Dari model regresi data panel dengan model *random effect* yang menggunakan variabel tidak bebas (*dependent variable*) persentase penduduk miskin dan variabel bebas (*independent variable*) PDRB per kapita, gini rasio, tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks harga konsumen makanan (IHKM), dan rasio pengeluaran non makanan (RNM) diperoleh:

- PDRB dan RNM mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat kemiskinan baik untuk model dengan memasukkan kedua variabel gini rasio dan TPT maupun model yang memasukkan hanya salah satu dari gini rasio atau TPT.

- Gini rasio, TPT dan IHKM mempunyai hubungan yang searah dengan tingkat kemiskinan baik untuk model dengan memasukkan kedua variabel gini rasio dan TPT maupun model yang memasukkan hanya salah satu dari gini rasio atau TPT.

TIM PENULIS
ANALISIS KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN

Pengarah : Wiwiek Arumwaty Soenarto

Editor : Kecuk Suhariyanto
Ahmad Avenzora

Penulis : Kecuk Suhariyanto
Ahmad Avenzora
Yoyo Karyono

Pengolah Data : Yoyo Karyono

Perapian Naskah : Yoyo Karyono